



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2022

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai wujud implementasi SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Walaupun data yang ditampilkan pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini masih merupakan data sementara diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2023
KEPALA DINAS

Dr. M. Iyas, ST, M.Sc
Pangkat : Pembina TK I
NIP : 197006061996031006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Struktur Organisasi.....	4
1.2. Isu Strategis.....	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	 10
2.1. Perencanaan.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 15
3.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran / IKU	17
3.2. Realisasi Anggaran.....	92
 BAB IV PENUTUP.....	 107
4.1. Kesimpulan Capaian Kinerja	107
4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	108
 LAMPIRAN.....	 110

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun struktur organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

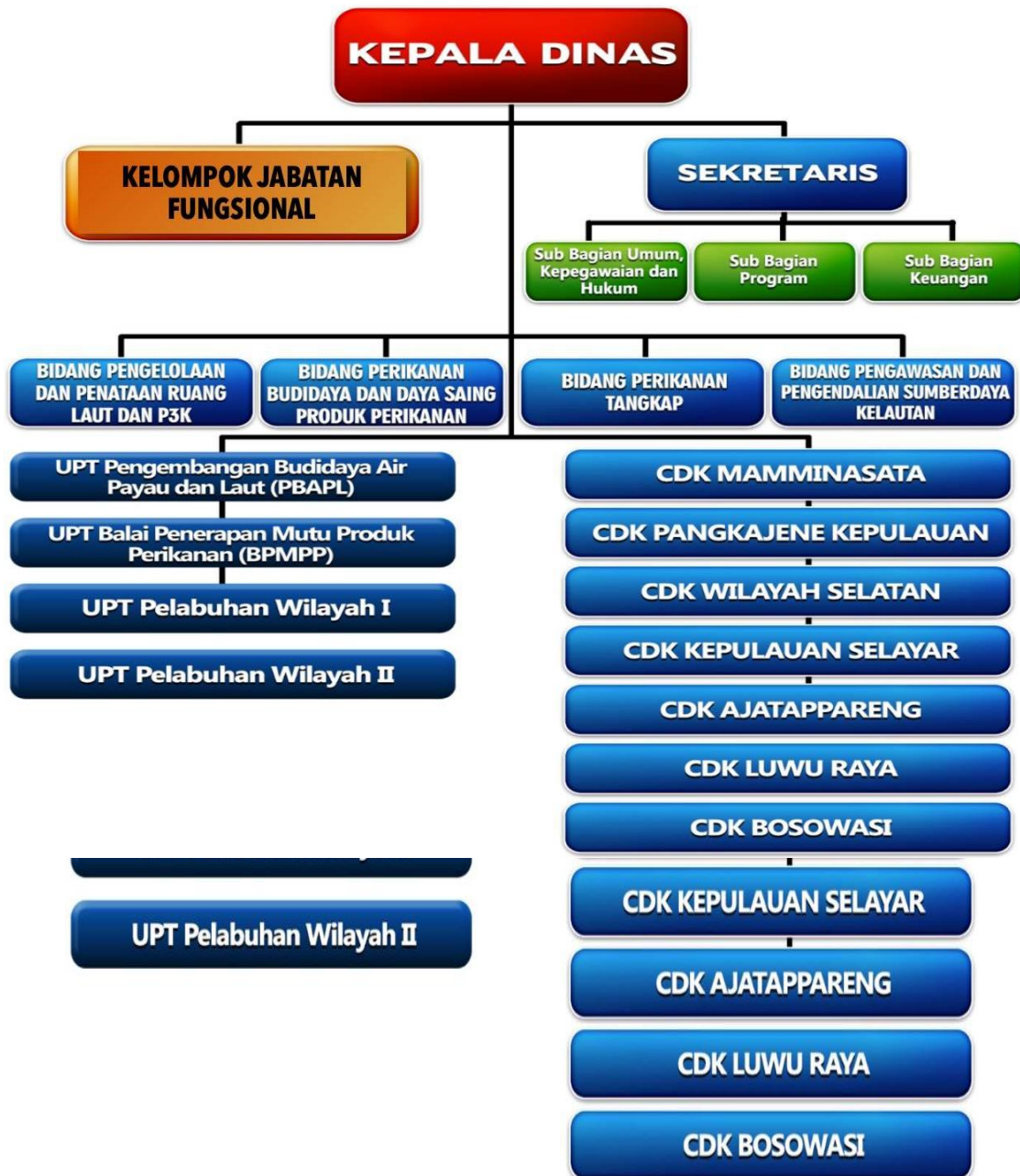
1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang (4 Bidang)
4. Kepala UPTD (4 UPTD)
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (7 CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

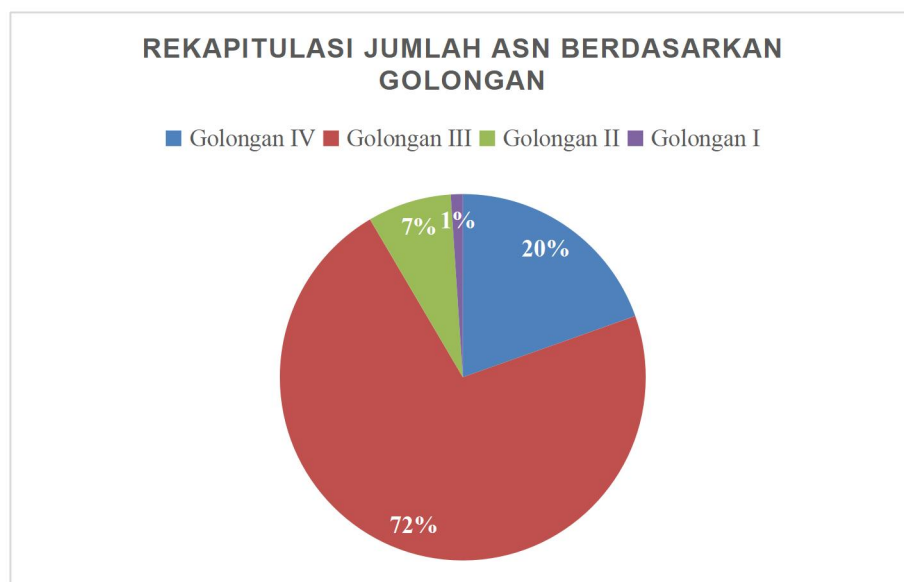
Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel sampai dengan akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.
Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2022 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2
2	II	0	0	1	0	4	0	7	2	12	2	14
3	III	6	6	9	5	9	13	37	51	61	75	136
4	IV	19	9	7	2	0	0	0	0	26	11	37
Jumlah		25	15	17	7	14	13	44	54	100	89	189



Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.
Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2022
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1	S3	3	2	5
2	S2	27	25	57
3	S1	49	59	108
4	Sarjana Muda	6	0	6
5	SMA	14	3	17
6	SMP	0	0	0
7	SD	1	0	1
	Jumlah	100	89	189

1.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi melalui identifikasi masalah pokok, masalah hingga akar masalah sebagai berikut :

Tabel.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dampak pandemic Covid 19	Adanya pembatasan sosial dalam melakukan aktivitas usaha perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan terjadi perlambatan
2	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparaturnya yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
4	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Pelayanan pelabuhan perikanan, PPI dan TPI tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal
6	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
7	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana prasarana dan SDM dalam penegak hukum di laut Kurangnya regulasi terkait penataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan terhadap kepatuhan kelengkapan dokumen perizinan
8	Marak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Pemanfaatan pesisir dan ruang laut belum mengacu pada Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata khususnya di wilayah laut dan pesisir Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum pemanfaatan ruang laut
9	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran
10	Mekanisme pengumpulan data perikanan bersifat masif dan belum adanya sistem pengelolaan data	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	yang terintegrasi		
	Data yang terintegrasi Penerapan Teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang belum merata	SDM yang masih menerapkan teknologi Lama	Pendampingan dalam penerapan teknologi belum terlaksana dengan baik dan holistik.

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut maka isu strategis Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2021 - 2023 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan Kawasan dan komoditas unggulan akibat masih rendahnya SDM yang terampil pada aparaturnya dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan.
2. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung usaha.
3. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Rencana Kinerja pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2022 yaitu :

Tabel 4
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
1.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,21	Kepala Dinas
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98,5	
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	9.52	
2.	Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	5.1	Kepala Dinas
		Produksi Perikanan (ton)	4.546.138,0	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	9.029,52	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	404.932,2	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	68,42	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	15.198,47	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.093.705,8	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	100	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (ton)	47.500	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III)
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	74,08	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III)
3.	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	62.7	Kepala Dinas
a.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	304.96	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	8.109,5	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	80	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
4.	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	102.78	Kepala Dinas
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	27,07	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	26.79	
5.	Sasaran: Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1.07	Kepala Dinas
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	38.58	
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	26.32	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	67.30	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
	PPK	secara berkelanjutan (%)		dan Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	88.73	Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III)

Prioritas kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 diarahkan pada:

- a. **fokus pada Pertumbuhan dan pemerataan** pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.
- b. Tahun 2020 telah terjadi **Pandemik COVID-19** sehingga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat pesisir oleh karena itu tahun 2022 perlu perencanaan dalam rangka penanganan dampak pasca Pandemi COVID-19.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan komitmen pimpinan, merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai sakip perangkat daerah (%)	86,21
	2.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98,5
	3.	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100
Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	4.	Produksi perikanan (ton)	4.546.138,0
	5.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	5,1
Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	62,7

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	102,78
Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,07
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	38,58
	11.	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	26,32

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	31.188.132.167
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.465.929.800
3. Pengelolaan perikanan tangkap	18.254.855.300
4. Pengelolaan perikanan budidaya	8.612.425.400
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	4.294.830.200
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.171.882.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
≤ 50 (Sangat Rendah / SR)
$50.1 \leq 65$ (Rendah / R)
$65.1 \leq 75$ (Sedang / S)
$75.1 \leq 90$ (Tinggi / T)
$90.1 \geq$ (Sangat tinggi / ST)

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan

pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sul Sel (%)*	5,1	9,4	184,3
		Produksi perikanan (ton)*	4.546.138	4.535.835,4	99,8
B	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/Kap/tahun)*	62,7	69,5	110,9
C	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,78	109,29	106,33

D	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,07	1,91	178,5
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologis yang aman (%)*	38,58	58,72	152,2
		Persentase penurunan tindakan IUU Fishing (%)	26,32	40,91	155,43
F	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,21	83,7	97,09
		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98,5	97,55	99,03
		Persentase Nilai Temuan material LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS/ IKU

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2022 sebagaimana berikut.



SASARAN : Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi

Terdapat 2 indikator Keberhasilan capaian sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi yaitu : (1) produksi perikanan, (2) kontribusi PDRB perikanan.

Tabel 7.
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sul Sel (%)*	5,1	9,4	184,31
	Produksi perikanan (ton)*	4.546.138	4.535.835,4	99,77
Rata-rata capaian sasaran				142,04

INDIKATOR

KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

Data kontribusi PDRB perikanan diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah :

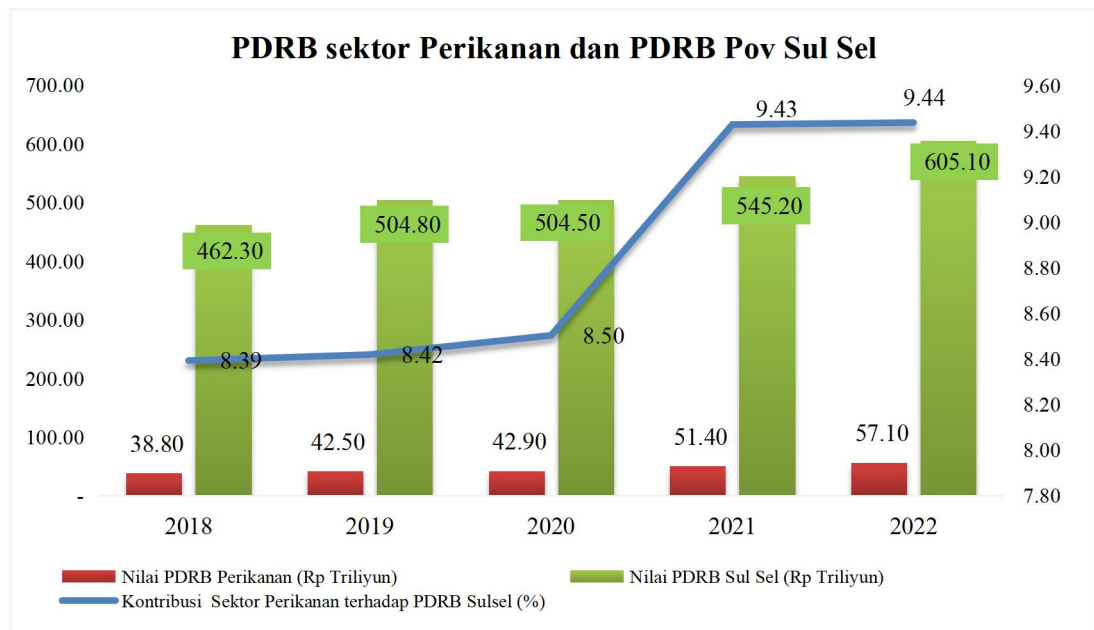
$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Tabel 8.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8.39	8.42	8.50	9.43	9.44	5.1	186.3	5,6	169,6

Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2022 sebesar 9,44 % atau mencapai target sebesar 184,3 % dan naik 0,1% dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 169,6 %. Melihat angka Kontribusi PDRB perikanan mengalami perlambatan disebabkan karena trend peningkatan nilai PDRB perikanan dan nilai PDRB Sulawesi Selatan hampir sama yaitu masing-masing sebesar 11,1 % untuk perikanan dan 10,9 % untuk Sulawesi Selatan.



Faktor pendukung tercapainya target adalah nilai produksi yang tiap tahun terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Capaian jauh melebihi target karena proyeksi saat penyusunan renstra perubahan tahun 2020 bahwa pandemi covid19 berdampak pada produksi dan nilai produksi ternyata tidak terjadi. Nilai PDRB perikanan meningkat 11,09 % yaitu 51,4 Trilyun pada tahun 2021 menjadi 57,1 Trilyun pada tahun 2022. Hal ini sebagai dampak dari peningkatan nilai produksi perikanan yang terus meningkat dapat dilihat pada tabel 9 berikut. Pasca pandemic covid harga produk perikanan khususnya produk unggulan ekspor seperti rumput laut kering harga sangat menjanjikan yaitu mencapai Rp 20.000 – Rp 30.000 per kilogram, sehingga mempengaruhi peningkatan nilai produksi budidaya sebesar 36,58 %.

Tabel 9.
Perkembangan nilai produksi perikanan tahun 2018 -2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	naik/turun 2021-2022
Total Nilai Produksi (Rp M)	21,781.73	23,592.85	22,487,1	26,559,7	33.498,7	+26,1 %
Nilai Produksi Tangkap (Rp M)	7,987.20	8,631.30	8,678,9	10.679,9	11.812,9	+ 10,6 %
Nilai Produksi Budidaya (Rp M)	13,729.50	14,856.30	13,785.50	15.878,3	21.685,79	+ 36,5 %

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan nilai produksi adalah permintaan ekspor karena produk perikanan Sulawesi Selatan merupakan produk ekspor terutama komoditi rumput laut. Berdasarkan tabel 10, nilai ekspor perikanan naik 32,83 % yang disumbang nilai ekspor rumput laut yang naik 90,9 % dibandingkan tahun 2021.

Tabel 10.
Realisasi Ekspor dan Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2017 - 2022

Uraian	Realisasi Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Ekspor perikanan (Ton)	130.623,1	166.373,2	158.416,5	179.019,0	191.325,3
Rumput laut	105.760	140.420,1	134.818,7	152.276,8	165.000,7
Udang	4.462	7.098,1	8.107,4	9.093,1	8.392,5
Tuna Cakalang Tongkol	2.455	2.915,4	2.474,6	1.880,1	3.305,9
Ikan lainnya	17.946	15.939,6	12.578,5	15.769,0	14.626,2
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)	340.369,3	355.301,7	339.002,9	397.787,7	528.397,7
Rumput laut	116.105,0	160.277,9	137.661,8	164.656,0	314.307,5
Udang	42.871	63.968,6	75.829,1	82.272,1	75.301,2
Tuna Cakalang Tongkol	20.329	27.081,6	23.292,2	17.766,8	32.814,8
Ikan lainnya	161.064,3	103.973,6	101.491,3	96.345,5	105.974,2

INDIKATOR 2

PRODUKSI PERIKANAN

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi garam. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut) dan produksi garam dari kabupaten/kota penghasil garam, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan. Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota I} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Tabel 11.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap 2023 (%)
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Produksi Perikanan (Ton)	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	4.535.835,4	4.546.138	99,8	4.759.871,9	95,3

Produksi perikanan mencapai target sebesar 99,8 % dan naik 0,8 % dibandingkan tahun 2021. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 produksi perikanan tumbuh positif dengan peningkatan rata-rata 1,7 %. Berdasarkan data tabel 16, **produksi perikanan tidak mencapai target disebabkan produksi garam hanya mencapai 6,9 % dari target yang ditetapkan tahun 2022.**

Tabel 12.
Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun
2018 – 2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2022	Capaian (%)
Produksi perikanan budiaya (ton)	3.568.952,6	3.662.761,4	3.713.111,8	4.081.480,5	4.095.802,9	4.093.705,8	100,1 %
produksi perikanan tangkap (ton)	366.540,7	398.565,2	389.208,2	417.410,7	436.749,6	404.932,2	107,9 %
Produksi Garam	86.712,70	140.338,87	45.310,5	1.283,15	3.282,93	47.500	6,91 %
Total Produksi	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	4.535.835,43	4.546.138	99,8 %

Produksi Perikanan Budidaya

Data produksi perikanan budidaya mencapai target sebesar 100,1 % dan naik 0,4 % dibandingkan tahun 2022. Produksi budidaya terdiri dari produksi tambak, rumput laut, kolam, sawah/mina padi dan KJA. Faktor pendorong peningkatan produksi adalah peningkatan produksi komoditi unggulan seperti udang dan rumput laut. Upaya yang telah dilakukan adalah bantuan sarana prasarana rumput laut 382 paket , desiminasi udang windu di 15 Kab/kota dan pandawa 1.000 Ha di Kab. Pinrang yang menjadi stimulus untuk mendorong peningkatan produksi budidaya.

Perlambatan peningkatan produksi disebabkan penurunan produksi di beberapa Kabupaten/Kota yaitu Sinjai, Bulukumba, Pangkep dan Jeneponto. Hasil koordinasi dengan petugas Statistik Kab/Kota didapatkan informasi bahwa pembudidaya udang gagal panen akibat penyakit dan banjir, rumput laut gagal panen akibat cuaca ekstrim.

Tabel 13.
Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 dan 2022

No	Kabupaten	Tahun		Keterangan
		2022	2021	
1	Luwu	641.850,7	627,586.9	2.27
2	Luwu Utara	240,762.5	232,620.3	3.50
3	Wajo	509,656.9	505,573.4	0.81
4	Bone	486,732.1	450,181.0	8.12
5	Sinjai	43,836.4	48,174.3	-9.0
6	Bulukumba	195,758	228,920.0	-14.49
7	Selayar	543.4	522.8	3.94
8	Bantaeng	89,375.2	86,575.3	3.23
9	Jeneponto	257,230.9	257,604.7	-0.15
10	Takalar	596,242.9	590,272.0	0.16
11	Makassar	1,928.9	1,506.7	28.0
12	Maros	28,404.0	27,000.7	5.20
13	Pangkep	427,456.3	473,025.4	-9.63
14	Barru	6,450.1	6,301.1	2.36
15	Pare Pare	62.1	40.9	51,83
16	Pinrang	67,357.0	64,553.1	4.34
17	Gowa	975.4	973.6	0.18
18	Luwu Timur	318,944.7	315,590.1	1.06
19	Palopo	176,078.6	158,518.8	11.08
20	Sidrap	1,488.3	1,350.9	10.17
21	Enrekang	1,848.1	1,836.0	0.66
22	Soppeng	444.0	436.6	1.69

No	Kabupaten	Tahun		Keterangan
		2022	2021	
23	Tana Toraja	750.3	692.0	8.42
24	Toraja Utara	1,626.0	1,624.00	0.12
Total		4,095,802.9	4,081,480.50	+0.23

Produksi budidaya komoditi unggulan budidaya seperti rumput laut dan udang sebagaimana tabel 14 berikut.

Tabel 14.
Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2022

Komoditi	Realisasi Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumput laut	3,317,524.90	3,406,924.6	3,441.138,7	3.786,411.7	3.796.733,3
Udang	46,524.0	44,520.5	50.876,1	54.974,6	61,314.4
Udang Windu	10,169.5	10,370.2	10.595,4	11.457,5	10.662,4

Rumput Laut

Tahun 2022 produksi rumput laut naik sebesar 0,14 % dibandingkan produksi rumput laut di tahun 2021. Faktor pendorong pencapaian target adalah dilaksanakannya bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya. Tahun 2022 jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut adalah sebanyak 52 kelompok. Selain itu, peningkatan produksi rumput laut didukung oleh antusiasme pembudidaya karena harga rumput laut yang tinggi berkisar di harga Rp 20.000 – Rp 30.000 per kilogram. Produksi rumput laut per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.



Tahun 2022 Bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut sebanyak 382 paket tersebar di Kabupaten Luwu Timur, Kabupeten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu , Kabupaten Sinjai, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bantaeng

Tabel 15.
Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2022

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT				
		Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Luwu	627.984,2	614.258,4	612.532,2	604.420,76	598.037.33
2	Luwu Utara	228.950,1	221.207,8	213.848,7	206.618,48	196.988.64
3	Wajo	483.088,6	479.632,2	476.078,9	476.055,25	462.474.73
4	Bone	366.491,0	337.592,2	286.767,2	291.686,60	275.627
5	Sinjai	43.400,5	47.823,8	45.976,4	47.733,99	40.775.81
6	Bulukumba	189.854,1	221.980,9	192.250,4	177.351,10	178.848.4

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT				
		Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
7	Selayar	381,4	359,1	642,1	395,74	365.5
8	Bantaeng	89.164,7	86.313	66.419,0	84.805,21	84.076.788
9	Jeneponto	252.795,5	253.389,9	231.754,4	165,036.22	193.517.76
10	Takalar	593.395,5	587.061	409.117,3	466,014.05	538.680.37
11	Maros	14.150,0	12.870	12.360,5	12,475.00	13.240.8
12	Pangkep	407.330	450.011	420.952,0	445,608.00	314.201.3
13	Barru	949,9	667.7	680	1,114.00	959
14	Pare-pare	7.9	-	-	-	-
14	Pinrang	23.641,4	19.399,1	14.243,7	16,266.30	15.448.8
15	Gowa	-	20	-	-	-
15	Luwu Timur	299.808,5	296.267,1	298.712,0	299,067.50	294.897
16	Palopo	175.340,0	157.558,4	123.732,4	112,276.43	109.385.91
TOTAL		3.796.733,3	3.786.411,7	3.441.138,7	3,406,924.64	3,317,525.14

Tahun 2020 dan 2021 Sulawesi Selatan peringkat I Penghasil rumput laut nasional.

Udang dan Udang Windu

Komoditi unggulan udang naik 11,53 % , sebaliknya produksi udang windu turun 6,94 % di tahun 2021. Dari informasi petugas statistik Kabupaten/Kota penyebab utama penurunan produksi adalah tingginya curah hujan sehingga lokasi tambak banjir.



Lokasi tambak banjir karena tingginya curah hujan

Pengembangan udang windu dilaksanakan melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Udang Windu Berbasis Kawasan yang dilaksanakan 15 (lima belas) kabupaten yakni Kabupaten Bone, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Takalar, Makassar, Wajo, Gowa, dan Sinjai. Pada tahun 2019 produksi Diseminasi Udang windu sebesar 11,2 ton, tahun 2020 hasil produksi diseminasi udang windu 12,5 ton, tahun 2021 hasil produksi diseminasi udang windu sebesar 7.8 ton dan tahun 2022 realisasi 7,2 ton.

Berdasarkan data statistik, kabupaten yang mengalami penurunan produksi udang windu adalah Kabupaten Luwu, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Pangkep, Barru, Gowa dan Palopo.

Tabel 16.
Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2018 -2022

NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Luwu	360,9	424,8	436,8	488.0	515.1
2	Luwu Utara	593,8	574,4	526,2	568.1	510.3
3	Wajo	213,8	146,1	97,1	96.3	94.8
4	Bone	2.240	1.887,3	897,8	877.2	843.2
5	Sinjai	6,3	16,4	62,0	63.5	8.1
6	Bulukumba	401,4	581	499,1	554.6	657.9
7	Selayar	7,2	10	9,6	9.1	7.8
8	Bantaeng	6,7	7,0	7,2	7.4	5.9
9	Jeneponto	295,5	293,6	316,9	407.0	406.5
10	Takalar	167,1	206,3	218,4	217.2	312.0
11	Makassar	84,3	199,1	319,7	367.0	272.6
12	Maros	1.915,3	1.857,4	1.820,5	1,772.6	1,749.5
13	Pangkep	1.038,5	1.261,7	1.046,0	1,129.0	1,183.0
14	Barru	97,4	99,6	100	122.0	120.0
15	Pinrang	3.312,7	2.652,7	3.621,9	3,057.4	2,874.6
16	Gowa	24	24,6	48,5	69.4	71.6
17	Luwu Timur	552,8	549,3	560,5	556.7	529.0
18	Palopo	4,2	7,1	7,2	7.9	7.5
TOTAL		10.662,4	11.457,5	11.457,5	10.595,4	10,169.5

Pada tahun 2020 Sulawesi Selatan peringkat VII dan tahun 2021 peringkat VI Penghasil udang nasional. Tahun 2022 data peringkat belum ada.

Persentase Ketersediaan Benur Berkualitas

Penyediaan benur berkualitas dilaksanakan oleh UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut (PBAPL) Realisasi produksi benur UPT PBAPL untuk penjualan dan distribusi bantuan benur desiminasi udang windu tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 17.
Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2018 -2022

NO.	Uraian	Target	Realisasi	
			Produksi (Ekor)	Capaian (%)
1.	Penjualan (PAD)	14.500.000	9.682.000	66,77
2.	Bantuan	7.500.000	7.590.000	101,20
Jumlah		22.000.000	17.272.000	78,51

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah upaya dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya air payau dan laut. **Tidak tercapainya target produksi benur disebabkan** belum adanya jaminan pasar menyebabkan kesulitan dalam pendistribusian benur. Selain itu jadwal penyaluran bantuan benih tidak sejalan dengan waktu produksi benih di UPT PBAPL. Fluktuasi suhu yang tidak stabil akibat curah hujan yang tinggi dan serangan penyakit (kunang-kunang dan protozoa) menyebabkan gagal panen.



Distribusi Benur di lokasi Diseminasi Inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (Sitto Bangkit)

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 436.749,6 ton atau mencapai target sebesar 107,86 % dan naik 4,63 % dibandingkan tahun 2021. **Strukturalisasi armada tangkap nelayan berupa kapal , mesin, alat tangkap serta alat bantu tangkap sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan.** Selama 5 tahun terakhir jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 18.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2022

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2022
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n (kelompok)	78	50	55	21	60	86	85
Jumlah Kelompok Nelayan (kelompok)	308	311	314	314	314	314	314

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2022
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	25.32	16.08	17.52	6.68	18,47	27,39	27,07

Bantuan sarana prasarana Pemda terdiri dari bantuan kapal 5 GT , 15 GT, 20 GT dan 30 GT, bantuan mesin kapal, alat tangkap dan alat bantu tangkap.



Penyediaan sarana prasarana peningkatan kapasitas nelayan kepada 64 kelompok berupa kapal, mesin, alat tangkap (jaring, pancing, purse seine, gill net, perangkap kepiting, alat tangkap pancing rawai) dan alat bantu tangkap (fish finder, rumpon)

Pelabuhan memnuhi Standar Operasional

Pelabuhan perikanan dikatakan memenuhi standar operasional jika **memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasional**. Standar operasional antara lain :1) Telah operasional, 2) Penetapan kelas oleh MKP, 3) Memiliki kelembagaan, 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran, 5) Menyusun WKOPP, 6) Menerapkan CPIB. Sampai dengan tahun 2022 realisasi PPI yang memiliki standar operasional sebanyak 13 PPI dari tota jumlah 19 PPI dari target 13 Pelabuhan atau terealisasi 100 %. Faktor penunjang keberhasilan adalah peningkatan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPI, penetapan kelembagaan dan petugas kesyahbandaran untuk optimalisasi fungsi pelayanan di pelabuhan.

Tabel 19.
Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2022

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KABUPATEN/KOTA	PELABUHAN PERIKANAN MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL SESUAI IKK LPPD PERMENDAGRI 28 TAHUN 2020					
			Telah operasional	Penetapan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	√	X	√	√	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Polejwa	Kab. Barru	X	X	√	X	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	√	X	√	X	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Pare-pare	√	X	√	√	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	√	X	√	X	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
10	Pelabuhan Perikanan Pontapi	Kota Palopo	√	X	√	√	X	X
11	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	√	X	√	√	X	X
12	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
13	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
14	Pelabuhan Perikanan Biresa	Kab. Bantaeng	√	√	√	√	X	X
15	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	X	X	√	X	X	X
16	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	√	X	√	√	X	X
17	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	√	X	√	X	X	X
18	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	√	X	√	X	X	X
19	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	√	√	√	√	X	X

Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) merupakan salah satu program prioritas. Sampai dengan tahun 2022 jumlah sarana prasarana yang terbangun di PPI dapat dilihat pada tabel 20.

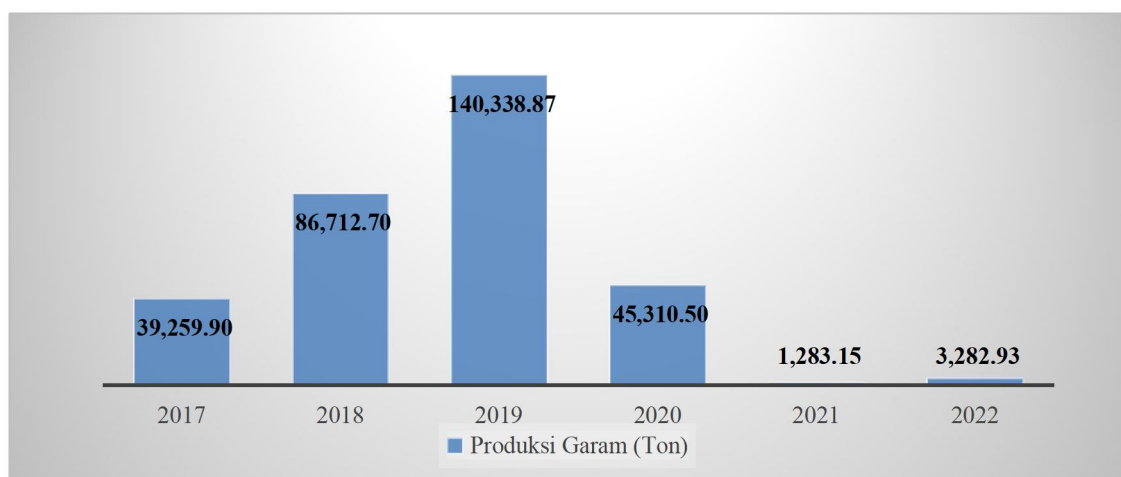
Tabel 20.
Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2022

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
3	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
4	Pelabuh Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Rehab TPI (2021) , rahab gedung TPI (2022)
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehabilitasi Kantor 120 Meter PPI Cempae (2021)
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020) Rehab Kantor UPT Pelabuhan wil 1 (2021) , rehab TPI (2022), Jalan kompleks PPI (2022)
7	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Jaringan instalasi listrik PPI (2021) Turap penahan tanah di PPI (2021) Fasilitas air (tawar) bersih (2021)
8	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Pengadaan air bersih (2019)
9	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Lappa(2021)
10	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
11	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari(2022)
12	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab Wisma Nelayan dan Penataan Lingkungan PPI Birea (2021)
13	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Penataan PPI Beba(2019), sarana operasional kesyahbandaran (2022), rehab TPI (2022). jaringan dan instalasi listrik (2022)

Produksi garam

Realisasi produksi garam tahun 2022 sebesar 3.282,9 ton atau mencapai target sebesar 6,9 % dan naik 155,9 % dari produksi tahun 2021. Faktor penghambat capaian adalah cuaca yang tidak menentu mempengaruhi produksi garam. Curah hujan yang tinggi memperpendek masa produksi dan banyak petani yang gagal produksi karena hujan yang tiba-tiba turun.



Untuk mendorong capaian produksi dan kualitas garam DKP provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah mengadakan sarana prasarana usaha garam berupa gudang garam 7 unit, sarana iodisasi berupa mesin iodisasi garam 3 unit (Kelompok saribattang kab. Selayar, Kelompok Hidayatullah Kab. Pangkep dan Kelompok Saro Biring Kab. Takalar), bantuan geomembran 4 paket (Kelompok Bunga Garam Bannara, kelompok Subur Jaya Kab. Takalar, kelompok Toddopuli Kab. Takalar dan Forum Peduli Laut Kab. Kepulauan Selayar).



Kondisi gudang garam tradisional yang sudah lapuk dan tidak layak lagi untuk menyimpan atau menampung garam hasil panen pada musim kemarau maupun musim penghujan. Dengan adanya pembangunan gudang garam rakyat menjaga harga garam tetap stabil disaat stok garam melimpah. Selain itu upaya revitalisasi gudang garam rakyat sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017 untuk tetap mempertahankan kualitas garam yang tersimpan.



Sarana iodisasi garam adalah sarana untuk membantu proses penambahan zat iodium berupa senyawa kalium iodat (KIO_3) atau kalium iodida dengan kadar 30-80 ppm kedalam garam secara mekanis. Pemberian pendampingan berupa pelatihan penggunaan alat iodisasi bertujuan untuk memberi pemahaman pentingnya iodisasi garam untuk meningkatkan gizi dan kesehatan, memberikan informasi cara pembuatan garam yang menghasilkan garam dengan kadar yodium sesuai ketentuan pemerintah. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan harga jual sehingga pendapatan petani garam lebih baik.



Sarana geomembran sebagai alas tambak garam mampu mempercepat kristalisasi garam sehingga panen lebih cepat dilakukan, garam lebih putih karena tidak tercampur dengan tanah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran; dan
- c. data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Tabel 21. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran II

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Capaian Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran I : meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	produksi perikanan	99.06	Program pengelolaan perikanan tangkap	18.823.931.300	16.018.427.221	85,1	54,18 (efisien)
	kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB sulsel	186.27	Program pengelolaan perikanan budidaya	8.367.213.050	7.973.125.034	95,3	
			Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK	2.323.383.100	2.104.947.000	90,6	
	Rata-rata capaian	142,6		29.514.527.450	26.096.499.255	88,42	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tergambar bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran II dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu capaian kinerja menunjukkan **persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada presentase realisasi penggunaan dana** karena capaian indikator sasaran telah melampaui target. Tidak optimalnya serapan anggaran karena adanya SPM yang tidak terbayarkan.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran II

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dapat dicapai melalui program :

- ❖ **Program pengelolaan perikanan budidaya** dengan Indikator Capaian Program :

- 1) Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya target Rp 15.198,47 M dan realisasi Rp 21.685,79 M,
- 2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya target 4.093.705,8 ton dan realisasi 4.095.802,9ton.
- 3) Persentase ketersediaan benur berkualitas target 100 % dan realisasi 78,51 %.

Program pengelolaan perikanan budidaya terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahax Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi dengan Target 5 rekomendasi realisasi 0 rekomendasi
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing dengan Target 10 rekomendasi realisasi 0 rekomendasi.
- 3) Kegiatan Penerbitan Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai

Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan dengan Target 5 rekomendasi realisasi 0 rekomendasi

- 4) Kegiatan Penerbitan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi dengan Target 10 laporan realisasi 0 laporan.
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Capaian Kegiatan 1) Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan Target 409 paket realisasi 382 paket 2) Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan target 1.150 Ha realisasi 1.150 ha, 3) Jumlah produksi benur yang berkualitas target 22.000.000 ekor realisasi 17.272.000 ekor.

❖ Program **Pengelolaan perikanan tangkap** dengan Indikator Capaian Program :

- 1) **Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap** target Rp **9.029,52 milyar** dan realisasi Rp **11.812,9 milyar** %,
- 2) Jumlah produksi perikanan tangkap target **404.932,2 ton** dan realisasi **436.749,6 ton**
- 3) Persentase produksi perikanan kelompok nelayan target **26,79 %** dan realisasi **29,43 %**
- 4) **Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional** target **68,42 %** realisasi **68,42 %**.

Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil dengan Target 588 unit, 11 paket, 5.010 buah realisasi 588 unit, 11 paket, 5.010 buah (2) Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah target 86 kelompok realisasi 86 kelompok.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah nelayan Penangkapan Ikan yang mendapatkan pembinaan dengan Target 2 kelompok realisasi 2 kelompok.
- 3) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan Target 100 rekomendasi realisasi 11 rekomendasi.
- 4) Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil (Izin Usaha) Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil dengan Target 2 rekomendasi realisasi 2 rekomendasi.
- 5) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di laut,Sungai,Waduk,Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah tanda daftar kapal yang telah diterbitkan dengan Target 125 laporan realisasi 125 laporan

- 6) Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan Target 5 pelabuhan realisasi 5 pelabuhan.
- 7) Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT Indikator Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT dengan Target 20 Rekomendasi realisasi 20 Rekomendasi.
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut Ikan dgn Ukuran Sampai dgn 10 GT di Laut,Sungai,Danau,Waduk,Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan Target 2 rekomendasi realisasi 2 rekomendasi.
- 9) Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan

Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan Target 10 laporan realisasi 10 laporan.

- 10) Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan Target 2 dokumen realisasi 0 dokumen.

❖ Program pengelolaan kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator capaian program :

- 1) **Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan target 67,30 % dan realisasi 67,30 %**
- 2) **Jumlah produksi garam rakyat target 47.500 ton dan realisasi 2.500 ton .**
- 3) **Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan target 74,08 % dan realisasi 48,48 %.**

Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dengan Target 28 unit realisasi 28 unit (2) Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi dengan target 75,9 Ha dan realisasi 75,9 Ha.
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah

dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi dengan Target 2 dokumen realisasi 0 dokumen (2) Jumlah rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan Target 12 rekomendasi realisasi 0 rekomendasi.

- 3) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan (kelompok) dengan Target 21 kelompok realisasi 21 kelompok (2) Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil target 14 unit dan realisasi 14 unit.

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Capaian indikator Persentase ketersediaan benur berkualitas sebesar 78,51 % dari target disebabkan sarana produksi (kolam perbenihan) sedang direhabilitasi, sering terjadi gagal panen akibat serangan penyakit dan fluktuasi suhu yang tidak stabil.
- ❖ Capaian indikator Produksi garam rakyat sebesar 5,26 % dari target disebabkan faktor cuaca ,tingginya curah hujan sehingga menghambat proses produksi garam serta belum tersedianya data pasang surut dan perkiraan iklim.
- ❖ Capaian indikator cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan sebesar 66,81 % dari target disebabkan terkendala di persyaratan administrasi proposal, ketidak sesuaian lokasi

yang diusulkan dengan yang dipersyaratkan , kontruksi tambatan perahu yang diusulkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia .

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Mengoptimalkan sarana prasarana produksi , meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil Uji PCR, monitoring kualitas air secara periodik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan.
- ❖ Penerapan teknologi sarana prasarana garam seperti sistem tunnel yang manfaatnya adalah adalah Proses produksi tidak terganggu jika ada hujan karena seluruh proses tertutup, Pembentukan kristal garam lebih cepat. Dan Kualitas garam lebih putih karena tidak tercampur dengan tanah
- ❖ Perlunya koordinasi dengan pihak penyuluh untuk pendampingan dan pembinaan kelompok dan verifikasi awal pemenuhan syarat penerima bantuan.



SASARAN : Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan indikator konsumsi ikan.

Tabel 22.

Capaian Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/Kap/tahun)*	62,7	69,5	110,9
Rata-rata capaian SS				110,9

INDIKATOR

KONSUMSI IKAN

Formulasi untuk mengukur konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut :

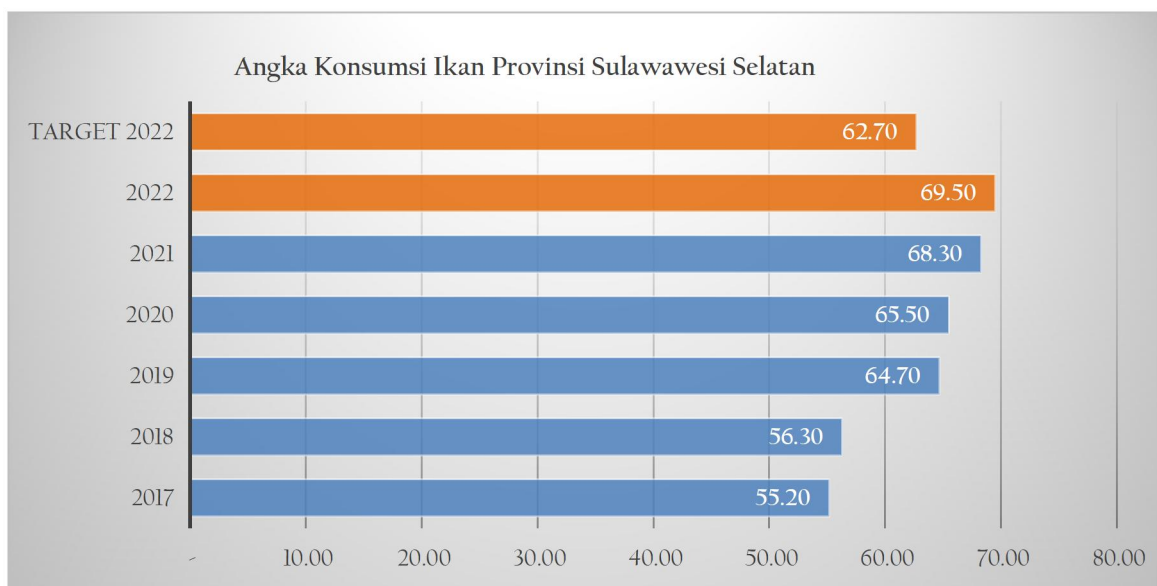
$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 7\%}{(\text{Jumlah penduduk 2022} + \text{jumlah penduduk 2023} / 2)}$$

Keterangan : 7 % adalah data produk diantarpulau yang tak terhitung (range 0 – 15 %)

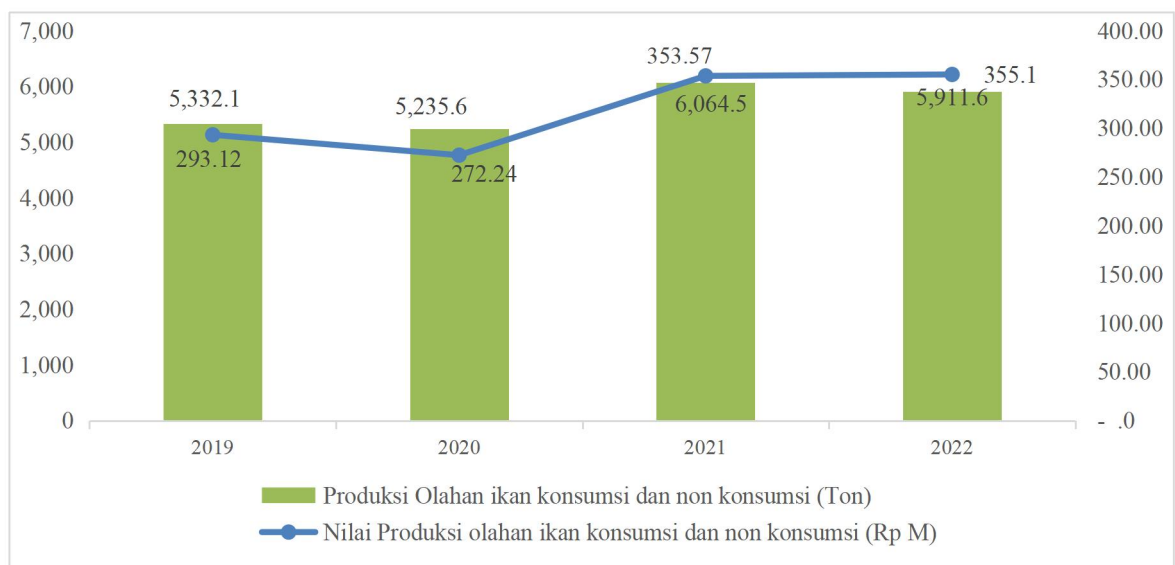
Tabel 23.
Capaian Kinerja indikator sasaran Konsumsi Ikan Tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian terhadap 2023 (%)
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	56.3	64.7	65.5	68.3	69,5	62,7	110,9	65,9	105,5

Angka konsumsi ikan terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan telah melampaui target nasional. Jika dibandingkan dengan target konsumsi ikan nasional sebesar 74.39 kg/kap/tahun capaian angka konsumsi ikan Sulawesi Selatan telah mencapai 91.81 %. Tingginya angka konsumsi ikan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung.



Upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah dengan peningkatan produksi olahan. Jumlah UPI tersebar di 24 Kabupaten /Kota sebanyak 1.353 UPI yang bergerak di fermentasi ikan, pelumatan daging /surimi, pembekuan ikan, pemindangan ikan, penanganan produk segar dan dingin, pengalengan ikan, pegasapan ikan, penggaraman ikan, pengolahan lainnya, serta pereduksian dan ekstraksi.



Pembinaan UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Tahun 2021 jumlah SKP terbit adalah 195 lembar dan tahun 2022



sebanyak 195 lembar. Manfaat SKP memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan (SNI untuk produk yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau

standar negara buyer untuk produk yang diekspor) hingga memperluas pasar sehingga omzet meningkat. Untuk mencapai target Angka Konsumsi Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPT BPMPP dan Bidang Budidaya Daya Saing terus menggiatkan kampanye Gemarikan dengan target **sasaran wilayah dengan rawan gizi dan *stunting* di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros.**



GEMARI KAN dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka stunting Dinas Kelautan dan Perikanan berpartisipasi dalam pameran/promosi produk dalam rangka Pekan Raya Sul Sel. dan mendapatkan juara III Stand terbaik

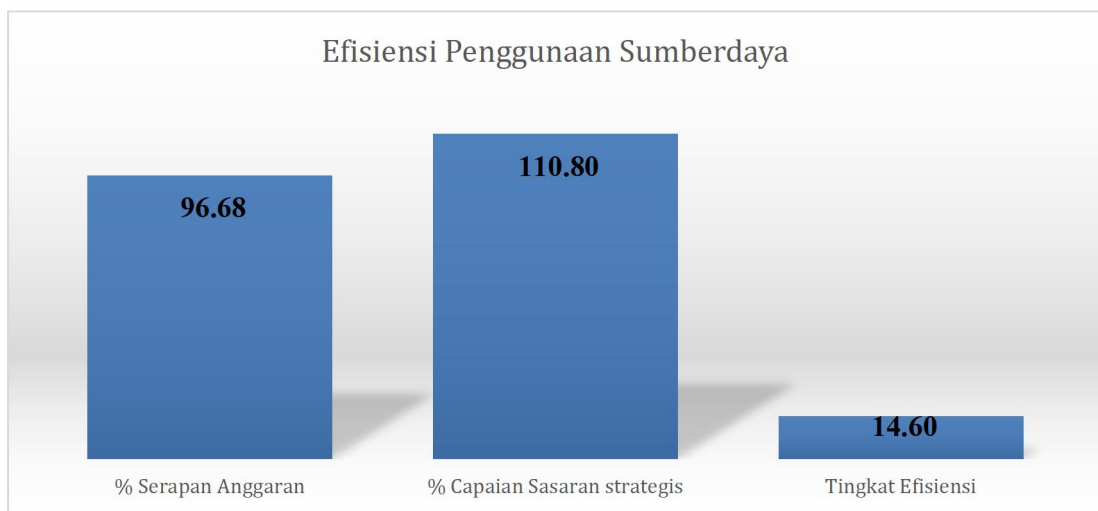


Layanan pengujian sampel di Laboratorium di UPT BPMPP mendukung Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Akreditasi ISO/IEC 17025:2017)

Analisis Efisiensi Penggunaan sumberdaya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran; dan
- c. data realisasi anggaran



Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Tabel 24.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 7
Sasaran III : Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Konsumsi Ikan	110,8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.392.063.300	1.345.819.096	96,68	14,6
Rata-rata capaian		110,8				96,68	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana. Tingginya capaian kinerja sasaran disebabkan capaian konsumsi ikan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa Yang mempengaruhi efisiensi adalah :

- a. capain indikator sasaran
- b. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- c. Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran III

Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Capaian Program :

- 1) Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan target Rp 311,06 M dan realisasi Rp 355,05 M
- 2) Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi target 5.436,2 ton realisasi 5.911,06 ton
- 3) Persentase pengujian mutu produk perikanan target 80 % dan realisasi 69,05 %.

program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan dengan Target 85 rekomendasi realisasi 0 rekomendasi

- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Capaian Kegiatan 1)Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan Target Jumlah promosi yang diikuti 2 promosi realisasi 2 promosi.
- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan dengan Target 2 laporan realisasi 2 laporan.

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Capaian indikator Persentase pembinaan mutu produk perikanan terealisasi 86,32 % dari target disebabkan saat ini tidak ada penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan sertifikat kesehatan (*health certificate*) dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan ke UPT BKIPM KKP berdasarkan UU 23 tahun 2014, beberapa peralatan pengujian rusak dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan akan diusulkan alokasi anggaran untuk perbaikan peralatan/pengadaan peralatan pengujian.



SASARAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan satu indikator yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Tabel 25.

Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,78	109,29	106,33
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				106,33

INDIKATOR 4.I

NILAI TUKAR NELAYAN

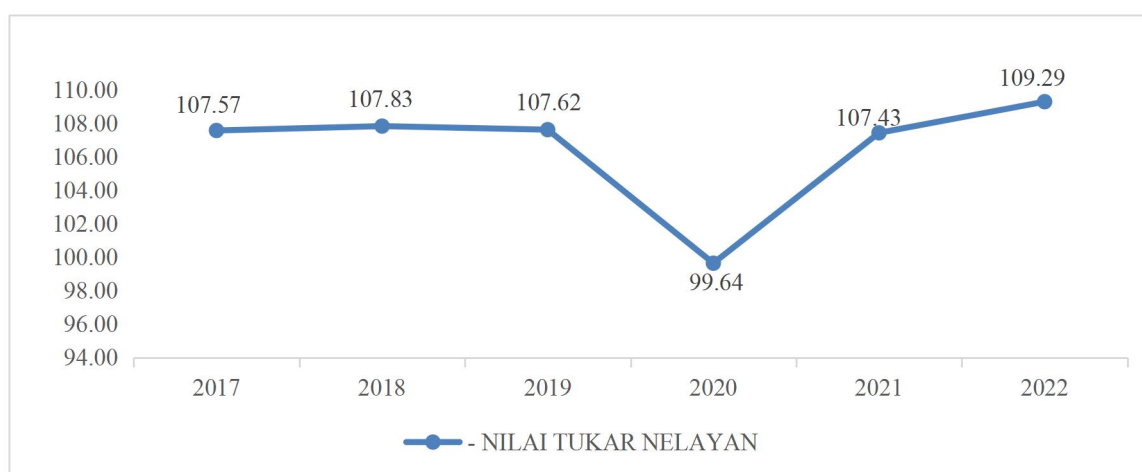
Data Nilai Tular Nelayan atau NTN bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (lb)}}$$

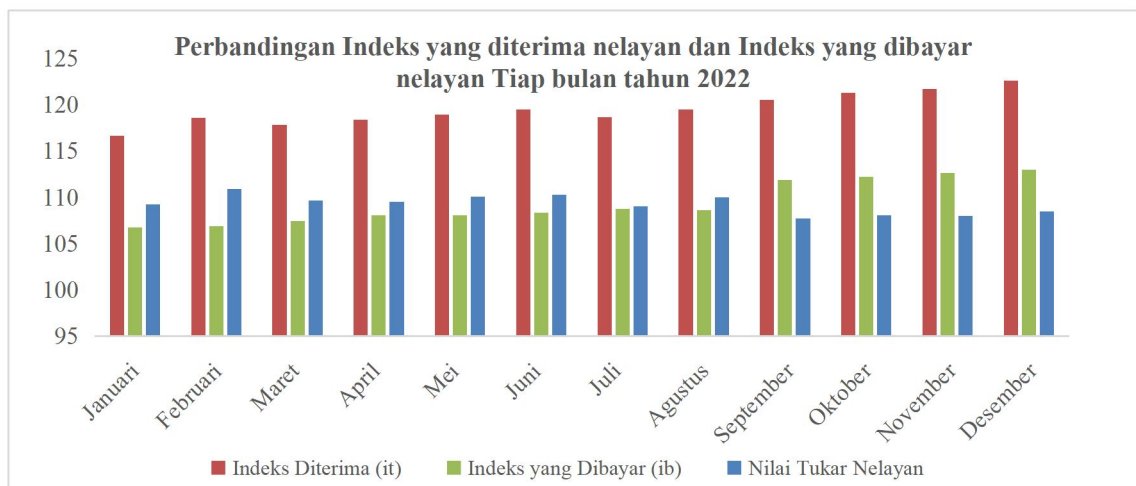
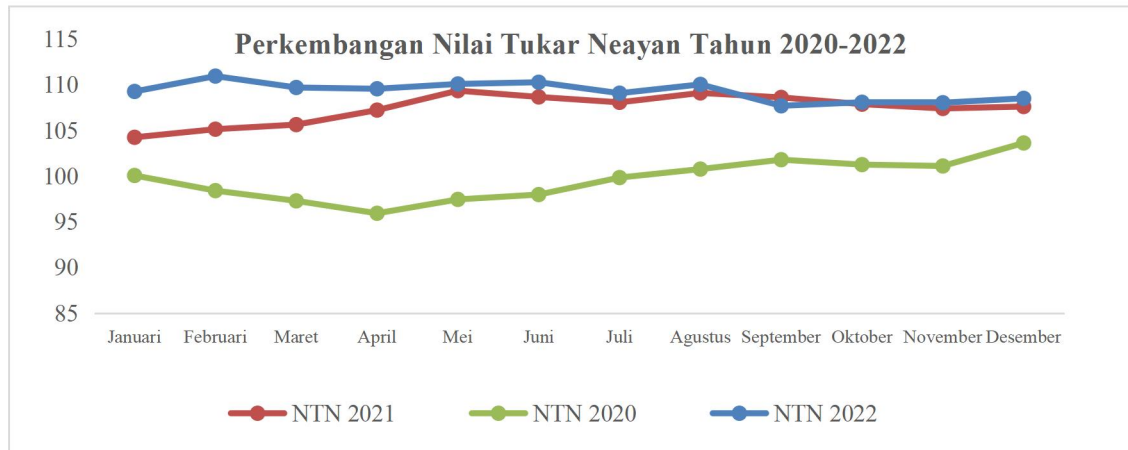
Tabel 26.
Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian terhadap 2023 (%)
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,8	107,6	99,64	107,43	109,29	102,78	106,33	103,19	105,9

Realisasi NTN tahun 2022 adalah 109,29 atau mencapai 106,33 % dari target yang telah ditetapkan tahun 2022 dan naik sebesar 1,73 % dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 103,19 maka telah dicapai sebesar 105,91 % dari target.



Kurun waktu tahun 2017-2022 realisasi NTN tahun 2022 merupaka capaian tertinggi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan semakin meningkat.



Jika dilihat trend NTN tiap bulannya, indeks yang diterima (*it*) nelayan jauh lebih besar dibanding indeks yang harus dibayar (*ib*) oleh nelayan pada tahun 2022. Hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2020 dimana kondisi pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat dengan diberlakukannya lockdown di berbagai negara dan PSBB di beberapa daerah sehingga berdampak pada menurunnya permintaan

pasokan ikan hasil tangkapan . Tahun 2021 kondisi mulai normal sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pun mulai kembali normal didukung produksi yang meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan nelayan.

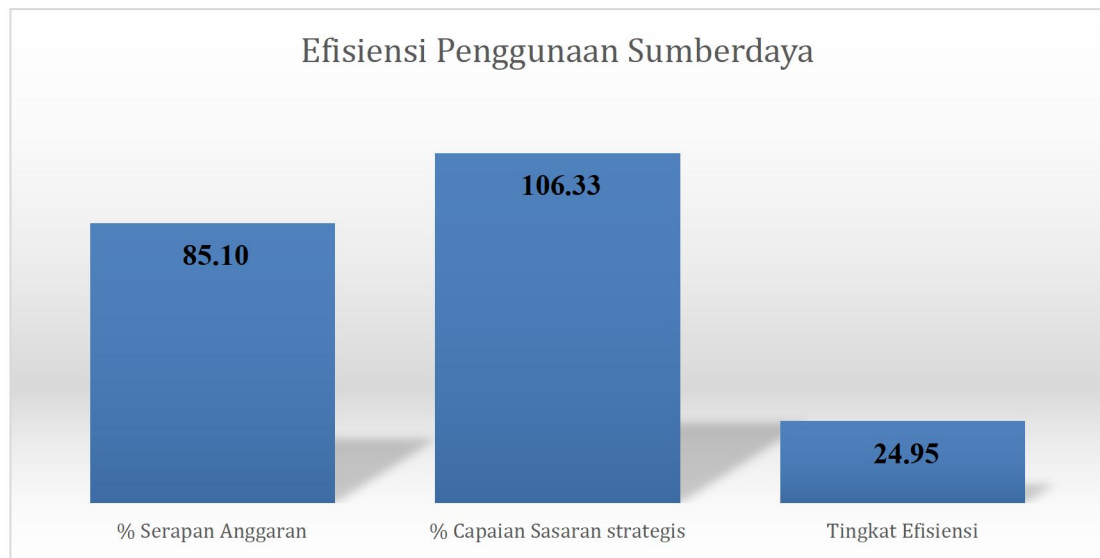
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran IV

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran; dan
- c. data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$



Tabel 27.

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 7
Sasaran : meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106.33	Program pengelolaan perikanan tangkap	18.823.931.300	16.018.427.221	85,1	24,95 (efisien)
Rata-rata capaian		106.33				85,1	

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana. Rendahnya capaian anggaran disebabkan tidak terserapnya anggaran karena beberapa pekerjaan tidak selesai seperti pekerjaan kapal sebanyak 11 kapal dan tidak terlaksananya Pertemuan Bimbingan Teknis

Penanganan Hasil Tangkapan Di Kapal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran program pengelolaan perikanan tangkap . Sedangkan tingginya capain indikator sasaran karena prediksi target perencanaan bahwa covid 2019 berdampak kepada nelayan ternyata tidak terjadi di tahun 2021. Dengan pelaksanaan *new normal* dimana masyarakat mulai beraktifitas sehingga pendapatan nelayan pun mulai kembali normal.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- a. capain indikator sasaran
- b. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan

Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air

Lainnya yang Dapat di Usahkan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana prasaran usaha perikanan tangkap sebagaimana telah dijelaskan pada analissi program /kegiatan yang menunjang dan keberhasilan pencapaian sasaran II sebelumnya.

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- ❖ Masih lemahnya data perikanan terkait jumlah armada, hasil produksi serta jumlah nelayan, sehingga penyaluran bantuan tidak berdasarkan pada azas pemerataan
- ❖ Masih adanya nelayan yang belum membuat izin usaha terhadap kegiatan yang mereka lakukan, sehingga terdapat permasalahan dalam melakukan aktivitas penangkapan.
- ❖ Kurangnya sosialisasi kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan serta penanganan hasil tangkapan ikan yang memiliki mutu nilai jual tinggi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- ❖ Melibatkan penyuluh perikanan Kabupaten/Kota agar aktualisasi serta update data perikanan (jumlah armada, jumlah produksi dan jumlah nelayan) dapat memberikan informasi yang akurat.
- ❖ Memperbaharui informasi tentang regulasi atau aturan yang baru kepada nelayan.
- ❖ Melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta penanganan hasil tangkapan yang bermutu tinggi.



SASARAN : Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan 3 indikator yaitu : (1) rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, (3) persentase penurunan tindakan IUU Fishing.

Tabel 28.

Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,07	1,91	178,27
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)*	38,58	58,72	152,2
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing (%)	26,32	40,91	155,43
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				158,43

INDIKATOR	RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERITORIAL
-----------	--

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2016 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penghitungan realisasi dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi yang dicadangkan/ditetapkan. Formulasi untuk mengukur rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah :

$$\text{Rasio kawasan lindung perairan} = \frac{\text{Luas kawasan lindung perairan}}{(\text{Total luas perairan teritorial yaitu } 43.047.900 \text{ Ha})}$$

Tabel 29.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator Kinerja Sasaran					Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,01	1,56	1,57	1,57	1,91	1,07	178,27	1,09	175,22

Realisasi rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah 1,91 % atau mencapai 178,27 % dari target yang telah ditetapkan tahun 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,66 % dan jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD tahun 2023 sebesar 1,09 maka telah dicapai sebesar 175,22 % .

Tabel 30.
Realisasi Rasio Kawasan Lindung Perairan Tahun 2017 - 2022

Bidang/Urusan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kawasan lindung perairan (Ha)	95,752.10	674.108,8	674.120.8	674.174.5	674.252,98	821.110,4
Total Luas perairan territorial (Ha)	43,047,900.0	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900
Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	0.22	1,56	1,57	1,57	1,57	1,91

Tingginya capaian disebabkan adanya perubahan data base line Luas Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) yang semula 674.105,8 Ha menjadi 820.886,83 Ha. Perubahan tersebut didasarkan data Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan sesuai **Peraturan Daerah No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 - 2041**. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 2 kawasan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri KKP dan 3 kawasan sedang proses penetapan Menteri KKP RI. Sehingga luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 820.886,83 Ha.

Tabel 31.
Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola dan Luas Daerah Perlindungan Laut

Uraian (Data Base Line)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Keterangan
A. Pencadangan/Penetapan KKPD	674.105,80	KKPD/KKP3K	820.886,83	
Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara	1.755,15	Tanalili Kab. Luwu Utara	1.510,53	
Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Pangkajene/KKPD Tupabiring	66.870	Liukang Tupabiring Kab. Pangkep	63.582,49	SK Menteri KKP nomor 71 tahun 2022
Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkep KKPD Liukang Tangayya	171.931,71	Pulau Liukang Tangaya Kab. Pangkep	508.534,4	SK Menteri KKP nomor 72 tahun 2022

Uraian (Data Base Line)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Keterangan
Kawasan Konservasi Teluk Bone (SK Pencadangan Gubernur)	423.942	Teluk Bone (Bone dan Sinjai)	238.093,55	
Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Pasi Gusung (SK Pencadangan Gubernur)	5.018	Pasi Gusung Kep. Selayar	1.769,73	Proses penetapan SK menteri
Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Kauna Kayuadi (SK Pencadangan Gubernur)	3.983	Kayuadi Kep. Selayar	6.899,43	Proses penetapan SK menteri
Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Barru/KKPD Panikiang	605.94	Pulau Pannikiang Kab. Barru	496,8	Proses penetapan SK menteri
B. Daerah Perlindungan Laut			223,57	
Rehabilitasi/Konservasi (Ha)				
Mangrove (Ha)			222,54	
Rehabilitasi/Konservasi Terumbu Karang (Ha)			0,85	
Rehabilitasi/Konservasi Padang Lamun (Ha)			-	
Total Kawasan Lindung Perairan (A+B)			821.110,4	

Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dan Pulih Kembali karena dilakukan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, sosialisasi pantai berseri sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi ekosistem pesisir. Aksi tersebut membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan.



Aksi tanam mangrove, tranpslantasi karang sebagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir, sosialisasi pantai berseri sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jelesatrian sumberdaya laut dengan menjaga kebersihan pantai, pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah

INDIKATOR

PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA
DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Formulasi untuk mengukur proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah :

$$\text{Proporsi tangkapanm ikan} = \frac{\text{Jumlag tangkapan tahun n}}{80 \% \text{ dari tangkapan maksimum lestari yaitu } 743.776 \text{ ton}} \times 100 \%$$

Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.776 ton. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%.

Tabel 32.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran V Proporsi Tangkapan Ikan Berada dalam Batasan Biologis yang Amn

Indikator Kinerja Sasaran					Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,92	53,59	52,18	56,12	58,72	38,58	152,2	42,44	138,36

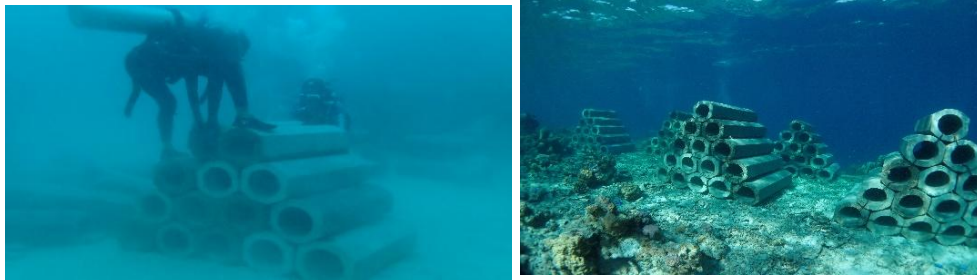
Pada tahun 2022 realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 58.72 % atau mencapai 152,2 % dari target. Proporsi tangkapan mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dari tahun 2021. Jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD maka telah dicapai 134,83 %. Peningkatan tersebut disebabkan produksi tangkap naik di tahun 2022. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan karena sebagai data kontrol produksi perikanan tangkap untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC).

Tabel 33.
Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
Tahun 2018- 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	363.853,0	398.565,2	389.208,2	417.410,7	436.749,6
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,92	53,59	52,33	56,12	58,72

Dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman masih dibawah angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Upaya yang dilakukan adalah bantuan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, patroli pengawasan untuk memantau penggunaan alat tangkap nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*) seperti yang banyak ditemukan adalah bahan peledak.



Apartemen ikan dibangun untuk menjadi rumah ikan yang terumbu karangnya telah rusak dan mati agar dapat menjadi tempat hidup baru, tempat berkembang biak, dan habitat baru untuk ikan dan biota karang lainnya

INDIKATOR

PERSENTASE PENURUNAN TINDAKAN IUU FISHING

Persentase penurunan tindakan IUU fishing di dapatkan dengan formulasi berikut :

$$\frac{\text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n - \text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n-1}{\text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n} \times 100 \%$$

Tabel 34.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator Kinerja Sasaran					Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023
	2018	2019	2020	2021	Realisasi	Target	Capaian		
Persentase penurunan tindakan IUU Fishing				83,33	40,91	26,32	155,43	35,71	35,71

Tabel 35.
Jumlah penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

NO	Unit Kerja	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun
		2019	2020	2021	2022
1	CDK Wilayah Selatan	-	1	3	0
2	CDK Maminasata	-	2	4	2
3	CDK Bosowasi	4	1	8	7
4	CDK Ajatappareng	-	-	-	0
5	CDK Luwu Raya	-	-	-	0
6	CDK Selayar	-	-	3	1
7	CDK Pangkep	-	8	4	3
TOTAL		4	12	22	13

Pada tahun 2022 realisasi persentase penurunan tindakan IUU fishing sebesar 40,91 % atau mencapai 155,43 % dari target. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2021 sebanyak 22 turun menjadi 13 kasus di tahun 2022. Keberhasilan capaian dipengaruhi peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha perikanan tangkap di laut sampai dengan 12 mil. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tindakan IUU fishing adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai di Cabang dinas Kelautan mendukung optimalisasi pengawasan usaha perikanan tangkap di laut yaitu adanya speedboat pengawasan di masing-masing CDK.

Tabel 36.
Jumlah Sarana Prasarana Pengawasan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

Sarana Kapal Pengawas Perikanan	
Speed Boat Pengawasan 12 Meter Mangiwang 02	CDK Ajatappareng
Speed Boat Pengawasan 12 Meter Mangiwang 04	CDK Bosowasi
Speedboat Pengawasan SDKP 8,5 Meter Mangiwang 06	CDK wilayah Selatan
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter Mangiwang 03	CDK Maminasata
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter Mangiwang 05	CDK Selayar
Speed boat pengawasan 12 meter Mangiwang 01	CDK Pangkep

Hasil pengawasan baik di laut maupun di darat, persentase kepatuhan Pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37.
Capaian Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan Tahun 2022

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa (si)			Persentase Kepatuhan (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	371	357	403	63,07	63,87	81,14
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	-	8	-	-	100
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	2	-	-	100
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	5	-	-	100
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	9	-	-	88,89



Kepatuhan pelaku usaha masih rendah khususnya di komponen pelaku usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil. Hasil patroli di lapangan ketidakpatuhan mayoritas disebabkan karena tidak lengkapnya dokumen kapal dan masa berlaku dokumen kapal yang sudah lewat. Selanjutnya penggunaan alat tangka yang merusak atau dilarang seperti trawls dan bahan peledak serta terdapat pelaku usaha perikanan tangkap yang melakukan penangkapan diluar jalur tangkap.

Aksi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan di lapangan, sosialisasi IUU fishing dan dibuka gerai perizinan di Cabang Dinas dan UPT Pelabuhan agar memudahkan nelayan untuk mengakses pengurusan dokumen kapal/perizinan kapal yang dibutuhkan.





Patroli Pengawasan SDKP untuk memantau aktivitas penangkapan ikan dan Sosialisasi IUU fishing dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap nelayan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran V

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- data capaian Sasaran Strategis;
- data pagu anggaran; dan
- data realisasi anggaran.

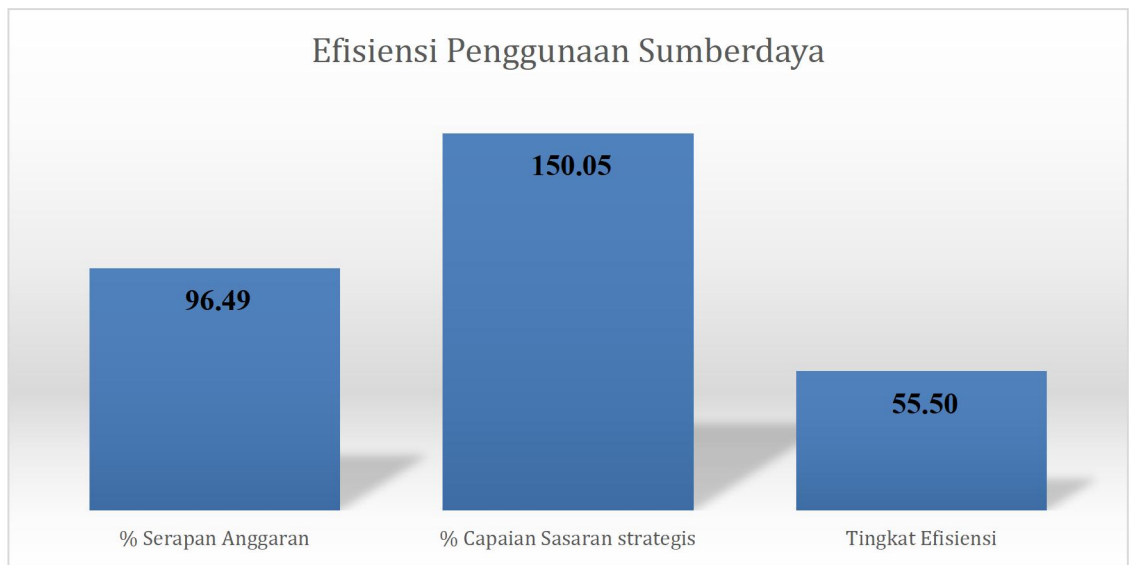
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang

teralisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Tabel 38.
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Meningkatkan Kelestarian dan Pengendalian Pemnafaatan Sumebrdaya Alam Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Capaian Realisasi anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 7
Sasaran : meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	149,52	Program pengawasan SDKP	12.593.872.046	12.434.342.380	98,73	23,23 (efisien)
	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	161,64	Program pengelolaan kelautan pesisir dan PPK	13.237.337.031	12.664.503.505	95,67	
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	50,01					
Rata-rata capaian		120,39		25.831.209.077	25.098.845.885	97,16	



Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan capaian 2 indikator sasaran melebihi angka 100 % yaitu rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial karena pelimpahan kewenangan sesuai UU 23 tahun 2014 dan proporsi tangkapan ikan ikan dalam batasan biologis yang aman karena produksi tangkap yang meningkat.

Hal ini sesuai dengan materi yang disampaikan pada acara FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Infomrasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- a. capain indikator sasaran
- b. Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- c. Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan
- e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran V**

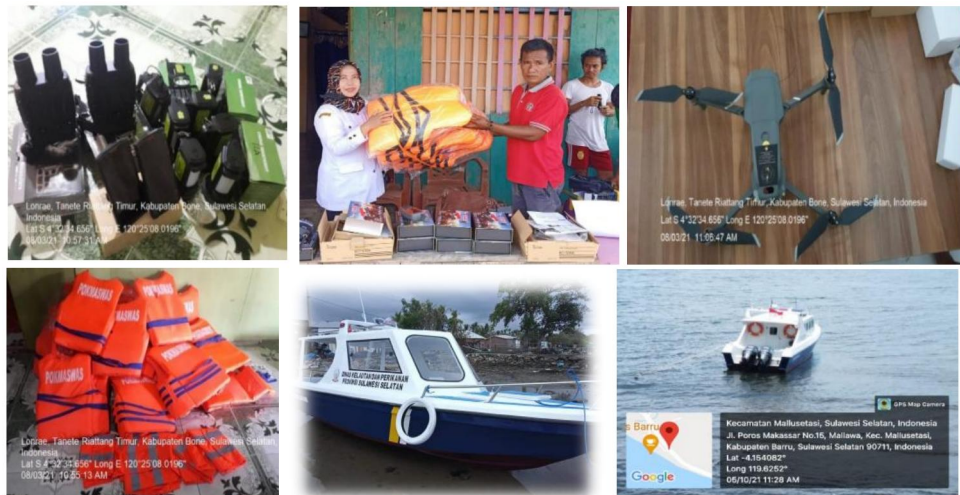
Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDKP dilaksanakan 2 program sebagai berikut :

- ❖ Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dengan indikator capaian program :

- 1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan target 88,74 % terealisasi 94,01 %

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program :

- 1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil Indikator Capaian Kegiatan 1) Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil dengan Target 18 unit realisasi 18 unit, 2) Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan target 441 unit realisasi 417 unit.



Pengadaan perlengkapan pengawas dan perahu pengawas perikanan

2. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah unit usaha perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan dengan Target 8 unit realisasi 8 unit.

❖ Program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator capaian program :

1. Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan target 67,30 % tercapai 67,30 %

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program :

- Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Capaian Kegiatan (1) Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak

dan gas bumi dengan Target 28 unit realisasi 28 unit (2) Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi dengan target 75,9 Ha dan realisasi 75,9 Ha.

Faktor pendukung keberhasilan

- ❖ Sarana prasarana pengawasan seperti speedboat pengawas, kapal pengawas, perlengkapan pengawasan untuk POKMASWAS yang mendukung kegiatan pengawasan
- ❖ Alokasi anggaran yang mendukung untuk rehabilitasi ekosistem mangrove dan rehabilitasi terumbu karang.

Hambatan/masalah yang dihadapi

- ❖ Belum tersedianya data base mangrove yang terupdate dan terkoordinasi antara Bidang Teknis, CDK dan Dinas Perikanan Kab/Kota sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.
- ❖ Masih Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di daerah, serta minimnya ketaatan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) di daerah

Solusi

- ❖ Penyusunan data base mangrove melibatkan unit kerja terkait dan kabupaten/kota.
- ❖ Melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir tindakan destructive fishing dengan menggunakan sarana prasarana pengawasan yang ada dan melibatkan Pokmaswas yang ada. Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat pengawas dan masyarakat pelaku usaha termasuk di sentra-sentra nelayan, pelabuhan/PPI/TPI, di laut dan diatas kapal perikanan agar selalu taat hukum khususnya untuk memiliki dokumen perizinan usaha/BPKP.



SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat 3 indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu (1) nilai SAKIP OPD, (2) persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan (3) persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

Tabel 39.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,21	83,7	97,09
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98,5	97,55	99,03
	Persentase Nilai Temuan material LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis				98,71

INDIKATOR	NILAI SAKIP OPD
-----------	-----------------

Formulasi Data Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari :

Nilai Sakip OPD = Lembar hasil Evaluasi

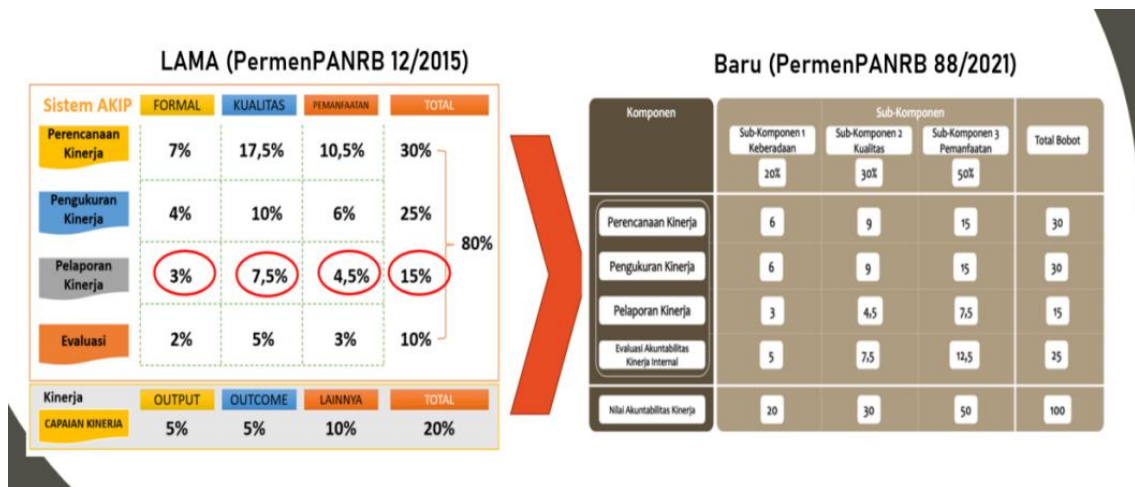
Nilai SAKIP OPD adalah nilai yang didapatkan dari evaluasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi yang bersifat tahunan, dengan capaian tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
	2019	2020	2021	Realisasi	Taregt	Capaian		
Nilai sakip OPD	85,61	85,78	83,70	83,70*	86,21	97,09	86,41	96,9

Tahun 2022, nilai SAKIP belum terealisasi karena menunggu jadwal pemeriksaan Tim Inspektorat yang biasanya dijadwalkan di triwulan ke II tahun berjalan. Untuk itu digunakan data sementara yaitu nilai SAKIP realisasi tahun 2021 sebesar 83,70. Jika dilihat dari realisi tiga tahun terakhir nilai SAKIP **turun sebesar 2,4** dan baru mencapai 96,9 % dari target RPJMD.

Adanya perubahan penilaian di sub komponen penilaian SAKIP dimana sub komponen Pemanfaatan awalnya 24 % menjadi menjadi 50 % perlu menjadi perhatian agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah benar-benar bisa terimplementasikan di unit kerja.



Tabel 41.
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2018	2019	2020	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2021	2022
Perencanaan Kinerja	30	28,35	28,05	27,89	Perencanaan Kinerja	30	25,5	
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,31	20,63	Pengukuran Kinerja	30	24,6	
Pelaporan Kinerja	15	13,83	13,83	12,49	Pelaporan Kinerja	15	11,1	
Evaluasi Internal	20	15,54	16,47	17,69	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	22,5	
Pencapaian Kinerja	10	7,18	6,95	7,08				
Jumlah	100	84,59	85,61	85,78	Jumlah	100	83,7	
Kategori		A	A	A			A	

Hal yang perlu menjadi perhatian dari rekomendasi Tim Evaluator tanggal 29 Juli 2022 untuk dilakukan perbaikan adalah :

- a. Perangkat Daerah menjaga kualitas serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

- b. Perlu disusun analisis kebutuhan atas kinerja sebenarnya khususnya terkait tabel TC 31 di dalam rencana kerja tahunan.
- c. Melakukan evaluasi analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi
- d. Menindaklanjuti rekomendasi atas pengukuran capaian triwulan sebagai dasar dalam penyusunan laporan akhir tahun
- e. Perlu memperhatikan keselarasan pagu anggaran pada DPA dan Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan rekomendasi tersebut diatas akan dilakukan perbaikan yaitu :

- a. Akan dibuat pedoman teknis untuk menjaga kualitas serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Akan dibuat analisis kebutuhan terkait dengan tabel TC.31 didalam rencana kerja tahunan.
- c. Akan dilakukan evaluasi analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- d. Akan disusun laporan kahir tahun berdasarkan pengukuran capaian triwulanan.
- e. Akan dilakukan verifikasi perjanjian kinerja untuk memastikan keselarasan pagu anggaran pada DPA dan perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV.
- f. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan dibuat dalam bentuk Nota Dinas sebagi instruksi ke unit kerja untuk ditindaklanjuti dan di evaluasi di monev berikutnya.

INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH
-----------	---

Cara menghitung indikator kinerja Capaian kinerja program perangkat daerah :

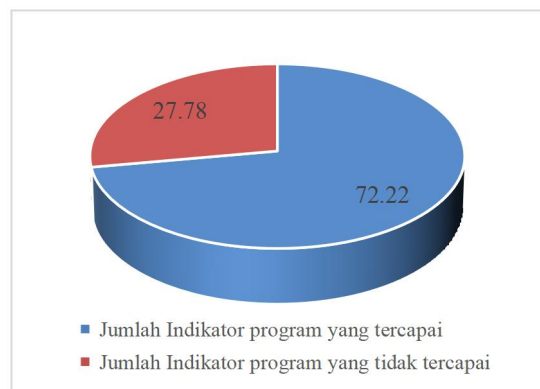
Persentase Capaian Kinerja Program = Lembar hasil Evaluasi

Tabel 42.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I **Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
	2019	2020	2021	Realisasi	Taregt	Capaian		
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	94,00	82,34	109,07	97,55	98,50	99,03	95	102,68

Realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah Dinas Kelautan dan perikanan 2022 sebesar 97,55 % atau mencapai target sebesar 99,03 % . Bila dibandingkan dengan tahun 2021 maka realisasi turun 9,14 %.



Tidak tercapainya target disebabkan terdapat 5 indikator program yang tidak mencapai target (27,78 %) dari jumlah keseluruhan indikator program sebanyak 15 indikator. Capaian program dapat dilihat pada lembar hasil evaluasi tabel 11 berikut :

Tabel 43.
Persentase Capaian Kinerja Program tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)
A	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp M)	9,029.52	11.812,9	130,8	120,6
		Produksi Perikanan tangkap (ton)	404,932.20	436.749,6	107,8	105,1
		Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	68.42	68.42	100	90,92
		Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)	27.07	27.39	101,2	77,31
		Persentase produksi perikanan kelompok nelayan (%)	26.79	29,43	109,9	70,71
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya (Rp M)	15,198.47	21.685,79	142,7	109,7
		Produksi Perikanan budidaya (ton)	4,093,705.8	4.095.802,9	100,1	104,7
		Persentase Ketersediaan benur berkualitas (%)	100	78,51	78,5	96,9
C	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan PPK	Produksi garam rakyat (ton)	47,500	3,282.93	6,9	2,8
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	74.08	49.49	66,8	56,4
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67.30	81,95	121,77	100
D	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan nonkonsumsi (Rp M)	304,96	355,05	114,1	115,9
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non	5.436,2	5.911,6	108,7	113,8

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Capaian 2021 (%)
		konsumsi (ton)				
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	80	69.05	86,3	90,1
E	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	88.73	94.01	105.9	79,08
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100	99.73	99.7	95,4
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik	100	99.47	99.5	99,5
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	9.52	7.14	75,03	434,2
Persentase Capaian program					97,55	109,1

INDIKATOR	PERSENTASE NILAI TEMUAN MATERIAL LHP YANG DITINDAK LANJUTI
-----------	--

Tabel 44.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
	2019	2020	2021	Realisasi	Taregt	Capaian		
Persentase Nilai temuan material LHP yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

Selama tahun 2022 Tim Inspektorat melaksanakan Audit sebanyak 3 kali. Dari hasil audit tersebut terdapat 26 temuan. Perkembangan hasil tindaklanjut audit oleh Tim Inspektorat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 45.
Temuan material LHP tahun 2022

Tahun	Jumlah Temuan	Ditindaklanjuti	Hasil kompilasi Inspektorat		Persentase LHP yang selesai ditindaklanjuti	Tanggal pemeriksaan	Obejk pemeriksaan
			Dalam proses	Sudah selesai ditindaklanjuti			
2022	8	8	-	8	100	12 Mei 2022	Dokumen SPJ bulan Juli-Desember 2021
	5	5	2	3	60	22 Agustus 2022	Dokumen SPJ bulan Januari-Mei 2022
	13	13	5	8	61,5	29 Desember 2022	Dokumen SPJ bulan Juni-Mei 2022
Total	26	26	7	19	73,1		



Pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tahun 2022 di Kantor Inspektorat Daerah tanggal 23 Januari 2023

Jumlah temuan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah temuan paling banyak di tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan.

Tabel 46.
Temuan material LHP tahun 2022

Tahun	Jumlah Temuan	Dalam proses	Sudah selesai ditindaklanjuti	Persentase LHP yang ditindaklanjuti
2019	28	-	28	100 %
2020	45	-	45	100 %
2021	28	-	28	100%
2022	26	7	19	73,1 %

Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan apresiasi sebagai OPD yang cepat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran I

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

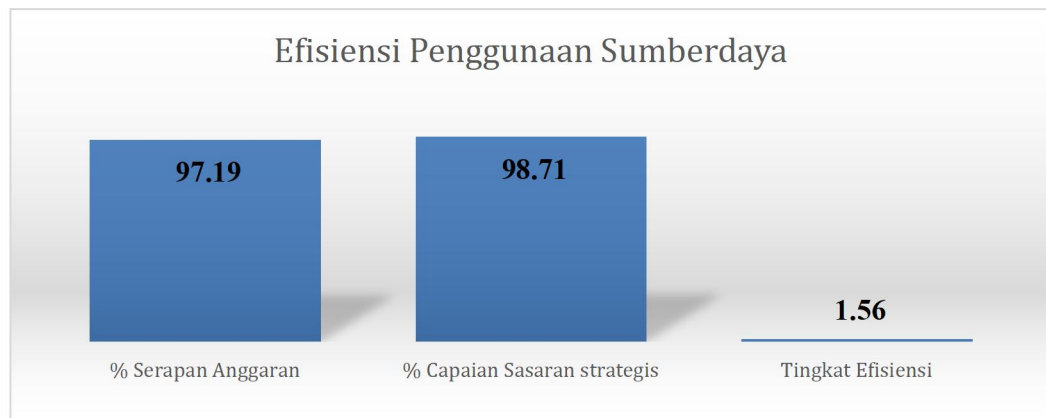
- data capaian Sasaran Strategis;
- data pagu anggaran; dan
- data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Realisasi Anggaran})}{\% \text{ Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Tabel 47.
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Sasaran I

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi anggarann	Tingkat Efisiensi
1	3	4	2	5	6	7	8= 4 - 7
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai sakiip perangkat daerah	97,09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.252.642.275	31.346.310.908	97,19	1,56 (Efisien)
	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)	99,03					
	Persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100					
Rata-rata capaian kinerja		98,71				97,19	



Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran I dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena persentase capaian kinerja sasaran triwulan I menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada persentase realisasi penggunaan anggaran.

Sasaran I memenuhi kategori **point c sebagaimana** hasil FGD Evaluasi kinerja anggaran tahun 2021 dan peningkatan kinerja anggaran satker lingkup KKP 16 Maret 2022 oleh Subdit Teknologi Informasi penganggaran Kementerian Keuangan bahwa **Yang mempengaruhi efisiensi adalah :**

- capaian indikator sasaran
- Penyerapan anggaran

Untuk memperoleh efisiensi yang optimal :

- a. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **sesuai** pagu yang dialokasikan.
- b. Capaian indikator sasaran **diatas target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan.
- c. Capaian indikator sasaran **sesuai target** dengan penyerapan anggaran **kurang** dari pagu yang dialokasikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I

Sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Capaian Program :

- 1) persentase realisasi kegiatan perangkat daerah target 100% dan realisasi 99,71 %.
- 2) Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik target 100 % dan realisasi 99,47 %.
- 3) Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP target 9,52 % dan realisasi 7,14 %.

terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- ❖ Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu target 7 dokumen realisasi 7 dokumen.
- ❖ Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Laporan Adminsitrase Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dengan Target 61 laporan realisasi 61 laporan.
- ❖ Administrasi kepegawaian perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dinas kelautan dan perikanan target persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target 100% realisasi 100%.

- ❖ Administrasi umum perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target 100 % realisasi 100%.
- ❖ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah target Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target 12 bulan realisasi 12 bulan.
- ❖ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan target Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan Target 42 unit realisasi 42 unit.

e. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan yang diantaranya adalah :

- Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik tercapai sebesar 99,47 % disebabkan terdapat 1 ASN indisipliner dari jumlah total ASN 189 pegawai.
- Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP tercapai sebesar 75 % disebabkan karena jadwal pemeriksaan Tim Inspektorat yang bertambah menjadi 3 kali di tahun 2022 dan masih adanya temuan yang didominasi pemanfaatan aset yang penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak.

- Realisasi kegiatan perangkat daerah sebesar 99,71 % dari target karena terdapat kegiatan yang tidak selesai, dan tidak terlaksana/dilaksanakan.
- realisasi anggaran mencapai 93,77 % dari pagu anggaran disebabkan adanya SPM yang tidak terbayarkan, kegiatan tidak dilaksanakan/tidak selesai, sisa pagu belanja kegiatan DAK, dan sisa belanja barang/jasa pagu kontrak.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Dilakukan teguran tertulis kepada ASN yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pihak inspektorat terkait pegawai yang indisipliner untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyelesaikan segera temuan khususnya yang terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset dengan melibatkan pihak terkait
- Koordinasi dengan pihak penyuluh untuk pendampingan dan pembinaan kelompok dan verifikasi awal pemenuhan syarat penerima bantuan.
- Untuk SPM yang tidak terbayarkan akan dikooordinasikan dengan Pihak Inspektorat untuk review kegiatan agar dapat dibayarkan di tahun 2023.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2022 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, sebesar Rp. 2.685.630.000,- realisasi sebesar Rp. 3.013.005.180,- (112,19 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022

U R A I A N	Target	Jumlah Anggaran Yang Teralisasi	% Capaian
RETRIBUSI DAERAH	2.685.630.000	3.013.005.180	112,19
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pergub. No. 88 Thn 2018)	942.700.000	932.942.080	98,96
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Perda No. 12 Thn 2019)	304.330.000	488.649.600	160,57
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Perda No. 12 Thn 2019)	432.000.000	435.026.000	100,70
Retribusi Penyelenggaraan Perizinan (Perda No.88 Thn 2018)	1.000.000.000	1.121.870.000	112,19
Pendapatan lain-lainya	-	27.917.500	-
Hasil sewa BMN	6.600.000	6.600.000	100

Secara total target PAD telah melampaui target namun masih terdapat item penerimaan PAD yang belum mencapai target dan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kerjasama sewa tambak target Rp 157.000.000 terealisasi Rp 107.000.000 atau mencapai 68,15 % disebabkan beberapa tambak yang rusak sehingga tidak ada yang bersedia untuk menyewa 2.adanya penyewa tambak yang tidak membayar sesuai nilai sewa yang disepakati karna tambak yang rusak

dan gagal panen

2. Sewa rumah dinas target Rp 28.200.000 teralisasi Rp 23.770.000 atau 84,29 % disebabkan Rumah dinas yang di tinggal penggunaannya(purnabakti) beberapa dalam kondisi rusak parah sehingga tidak dapat di sewakan kembali.
3. Retribusi layanan kepelabuhanan jasa hasil lelang target Rp 20.000.000 terealisasi Rp 12.400.750 atau 62 % disebabkan MOU PKS antara Kab dan Provinsi masih dalam proses perampungan

b. Belanja

Untuk tahun 2022, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 98.186.281.309,- dan total realisasi sebesar Rp 88.014.550.817,- (89,64 %), dan realisasi fisik 94,81 % .

Tabel 49.
Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2022

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja			Sisa Anggaran
			Keuangan		Fisik	
			(Rp.)	%	(%)	
A.	BELANJA LANGSUNG	79,288,024,805	74,350,572,447	93.77	99.73	4,937,452,358
I	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK	14,180,411,130	13,532,203,193	95.43	99.50	648,207,937
1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	11,856,028,030	11,427,256,193	96.38	99.41	428,771,837
a	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1,187,010,400	926,686,209	78.07	100	260,324,191
b	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10,669,017,630	10,500,569,984	98.42	99.35	168,447,646

2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,000,000	-			1,000,000
a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	200,000	-			200,000
b	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	200,000	-			200,000
c	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	200,000	-			200,000
d	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	200,000	-			200,000
e	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	200,000	-			200,000
3	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2,323,383,100	2,104,947,000	90.60	100	218,436,100
a	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	755,625,000	612,804,000	81.10	100	142,821,000
b	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,122,000,000	1,104,691,000	98.46	100	17,309,000
c	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	445,758,100	387,452,000	86.92	100	58,306,100
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	18,823,931,300	16,018,427,221	85.10	99.99	2,805,504,079
4	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	11,882,877,600	10,349,622,865	87.10	100	1,533,254,735
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	200,000	-		0.00	200,000

b	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6,015,510,500	5,702,708,825	94.80	100	312,801,675
c	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	5,867,167,100	4,646,914,040	79.20	100	1,220,253,060
5	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) derah Provinsi	15,234,000	14,505,000	95.21	97.37	729,000
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	14,834,000	14,505,000	97.78	100	329,000
b	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	200,000	-	-	-	200,000
c	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	200,000	-	-	-	200,000
6	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	14,960,000	13,740,000	91.84	98.66	1,220,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5,000,000	5,000,000	100	100	-
b	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	9,760,000	8,740,000	89.55	100	1,020,000
c	Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	200,000				200,000
7	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	11,860,000	11,860,000	100	100	-
a	Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	5,000,000	5,000,000	100	100	-

b	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	6,860,000	6,860,000	100	100	-
8	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (ssatu) Daerah Provinsi	10,180,000	9,120,000	89.59	98.04	1,060,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	9,980,000	9,120,000	91.38	100	860,000
9	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6,862,611,600	5,596,169,256	81.55	100	1,266,442,344
a	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	51,156,200	49,842,200	97.43	100	1,314,000
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	6,655,775,000	5,394,570,856	81.05	100	1,261,204,144
c	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	155,680,400	151,756,200	97.48	100	3,924,200
10	Penerbitan Izin Pengadaan kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10,978,000	9,900,000	90.18	98.18	1,078,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	10,778,000	9,900,000	91.85	100	878,000

11	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Rawa, Waduk dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14,430,100	13,510,100	93.62	98.61	920,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	14,230,100	13,510,100	94.94	100.00	720,000
12	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	400,000	-	-	-	400,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	200,000	-	-	-	200,000
13	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Laut, Sungai, Rawa, Waduk, Danau dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400,000	-	-	-	400,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	200,000	-	-	-	200,000
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,392,063,300	1,345,819,096	96.68	99.94	46,244,204

14	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80,600,000	80,100,000	99.38	99.50	500,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000
c	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	80,200,000	80,100,000	99.88	100	100,000
15	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1,311,063,300	1,265,719,096	96.54	100	45,344,204
a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	294,877,700	290,204,415	98.42	100	4,673,285
b	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	1,016,185,600	975,514,681	96.00	100	40,670,919
16	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400,000	-	-	-	400,000
a	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000
b	Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000

IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8,367,213,050	7,973,125,034	95.29	98.35	394,088,016
17	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600,000	-	-	-	600,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	200,000	-	-	-	200,000
b	penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	200,000	-	-	-	200,000
c	Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan	200,000	-	-	-	200,000
18	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	200,000	-	-	-	200,000
a	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	200,000	-	-	-	200,000
19	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	2,235,400	-	-	-	2,235,400
a	Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	2,035,400	-	-	-	2,035,400
b	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	200,000	-	-	-	200,000
20	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400,000	-	-	-	400,000

a	Penetapan persyaratan dan prosedur perbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000
b	Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	200,000	-	-	-	200,000
21	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8,363,777,650	7,973,125,034	95.33	98.39	390,652,616
a	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota	179,400	179,400	100	100	-
b	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2,331,434,800	2,184,300,864	93.69	94.21	147,133,936
c	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	812,960,000	612,870,000	75.39	100	200,090,000
d	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	149,926,450	148,390,000	98.98	100	1,536,450
e	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	4,911,761,600	4,875,546,770	99.26	100.00	36,214,830
	<i>Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing</i>	<i>4,287,230,400</i>			100	
f	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69,834,000	69,704,000	99.81	100	130,000
g	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	87,681,400	82,134,000	93.67	100	5,547,400

V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,271,763,750	4,134,686,995	96.79	100.00	137,076,755
22	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	4,223,311,950	4,086,923,755	96.77	100	136,388,195
a	Pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	79,995,700	75,547,700	94.44	100	4,448,000
b	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	3,869,869,450	3,752,471,255	96.97	100	117,398,195
c	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	29,104,000	29,062,000	99.86	100	42,000
d	Penumbuhan dan Pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	244,342,800	229,842,800	94.07	100	14,500,000
23	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	48,451,800	47,763,240	98.58	100	688,560
a	Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya	4,907,400	4,907,000	99.99	100	400
b	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai kewenangannya	21,295,400	20,610,400	96.78	100.00	685,000
c	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	22,249,000	22,245,840	99.99	100	3,160
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32,252,642,275	31,346,310,908	97.19	100.00	906,331,367
24	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,490,709,000	1,447,139,226	97.08	100	43,569,774

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215,666,000	212,911,400	98.72	100	2,754,600
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,717,700	18,383,500	98.21	100	334,200
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23,059,000	22,928,343	99.43	100	130,657
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37,171,300	27,434,738	73.81	100	9,736,562
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23,952,500	22,979,980	95.94	100	972,520
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,007,034,300	980,953,778	97.41	100	26,080,522
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165,108,200	161,547,487	97.84	100	3,560,713
25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,000,073,530	22,731,891,628	98.83	100	268,181,902
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,791,590,530	22,533,006,538	98.87	100	258,583,992
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,977,000	4,197,000	84.33	100	780,000
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,985,500	5,555,500	79.53	100	1,430,000
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9,498,500	8,320,900	87.60	100	1,177,600
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200,000	200,000	100	100	-
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29,916,000	29,691,950	99.25	100	224,050
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	156,692,000	150,855,740	96.28	100	5,836,260
h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	214,000	64,000	29.91	100	150,000
26	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174,966,200	145,106,600	82.93	99.54	29,859,600
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200,000	-	-	-	200,000
b	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	94,171,200	68,381,600	72.61	100	25,789,600

c	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	79,740,000	76,595,000	96.06	100	3,145,000
d	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000	-	-	-	200,000
e	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	255,000	130,000	50.98	100	125,000
f	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200,000	-	-	-	200,000
g	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	200,000	-	-	-	200,000
27	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	430,000	430,000	100	100	-
a	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	200,000	200,000	100	100	-
b	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	230,000	230,000	100	100	-
28	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179,595,900	163,967,267	91.30	100	15,628,633
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	44,969,900	40,816,767	90.76	100	4,153,133
b	Pedataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	18,861,800	18,131,800	96.13	100	730,000
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10,594,300	7,686,800	72.56	100	2,907,500
d	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	105,169,900	97,331,900	92.55	100	7,838,000
29	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,396,646,925	1,248,672,621	89.41	99.98	147,974,304
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	13,446,000	12,514,000	93.07	100	932,000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627,161,025	503,534,094	80.29	100	123,626,931
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,700,000	24,500,000	99.19	100	200,000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,680,700	47,479,200	99.58	100	201,500

e	Fasilitasi kunjungan tamu	52,803,500	45,608,500	86.37	100	7,195,000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630,633,200	615,036,827	97.53	100	15,596,373
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	222,500	-	-	0.00	
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,000,000	198,085,000	99.04	100	
a	Pengadaan Aset Tak Berwujud	200,000,000	198,085,000	99.04	100	
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,479,366,470	4,356,915,010	97.27	100	122,451,460
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	830,466,984	776,582,180	93.51	100	53,884,804
b	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	15,050,000	15,050,000	100	100	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,633,849,486	3,565,282,830	98.11	100	68,566,656
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,330,854,250	1,054,103,556	79.21	100	276,750,694
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626,272,250	608,626,982	97.18	100	17,645,268
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,992,000	32,592,500	79.51	100	8,399,500
c	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	80,000,000	-	0.00	100	80,000,000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410,000,000	389,306,074	94.95	100	20,693,926
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159,440,000	9,440,000	5.92	100	150,000,000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,150,000	14,138,000	99.92	100	12,000

Capaian realisasi anggaran mencapai 93,77 % dari pagu anggaran disebabkan adanya SPM yang tidak terbayarkan, kegiatan tidak dilaksanakan/tidak selesai, sisa pagu belanja kegiatan DAK, dan sisa belanja barang/jasa pagu kontrak.

Realisasi fisik tidak mencapai 100 % karena terdapat kegiatan yang tidak selesai dan hanya mencapai bobot 76,32 % yaitu pembangunan tambatan perahu di pulau samalona kota makassar, kegiatan penerbitan izin tidak dilaksanakan karena bukan kewenangan Dinas, bantuan sarana prasarana rumput laut 27 paket tidak terealisasi karena tidak memenuhi syarat administrasi kelompok.

c. Penghargaan yang Diterima

Keberhasilan yang diraih ditahun 2022 adalah diterimanya penghargaan Peringkat II Satuan Kerja Provinsi dengan Kinerja Terbaik oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan



BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Secara umum rata-rata nilai capaian sasaran strategis tahun 2022 adalah kategori sangat tinggi karena capainnya diatas 100 % sebagaimana tabel berikut :

KODE SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN
SS I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	98,71 %
SS II	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	142,04 %
SS III	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produkkelautan dan perikanan	110,85 %
SS IV	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usahakelautan dan perikanan	106,33 %
SS V	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	158,43 %
Rata-Rata Capaian		123,27 %

- a. Dari 10 Indikator sasaran strategis /indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022, terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya tidak mencapai target sebagaimana tabel berikut:

KODE SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
SS I	Nilai saki perangkat daerah (%)	97,09 %
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	97,55 %

KODE SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100 %
SS II	Produksi perikanan (ton)	99,77 %
	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	184,31 %
SS III	Konsumsi Ikan	110,85%
SS IV	Nilai tukar nelayan (NTN)	106,33 %
SS V	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	178,27 %
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	152,20 %
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	155,4 %
Rata- Rata capaian		128,18 %

- b. Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 79.288.024.805 terealisasi Rp 74.350.572.447,- atau 93,77 % dan realisasi fisik 99,73 %.

4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka perbaikan ke depan :

- a. Produksi garam mencapai target 6,91 % disebabkan teknologi yang masih tradisional serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam yaitu penerapan sistem tunnel dan inovasi teknologi penggaraman seperti tunnel dan geomembran, sarana prasarana ionisasi garam untuk meningkatkan nilai jual dan pasar produk.

Penerapan teknologi sarana prasarana garam seperti sistem tunnel yang manfaatnya adalah adalah Proses produksi tidak terganggu jika ada hujan karena seluruh proses tertutup, Pembentukan kristal garam lebih cepat dan Kualitas garam lebih putih karena tidak tercampur dengan tanah.

- b. Persentase ketersediaan benur berkualitas teresalisasi 78,51 % dari target. Hal ini disebabkan dari target ketersediaan 22.000.000 benur terealisasi 17.272.000 benur. Faktor penghambat capaian kinerja disebabkan sarana produksi (kolam perbenihan) sedang direhabilitasi, sering terjadi gagal panen akibat serangan penyakit dan fluktuasi suhu yang tidak stabil. Upaya yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan sarana prasarana produksi , meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil Uji PCR, monitoring kualitas air secara periodik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan.
- c. Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan mencapai target 66,81 % terkendala di persyaratan administrasi proposal, ketidaksesuaian lokasi yang diusulkan dengan yang dipersyaratkan, kontruksi tambatan perahu yang diusulkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Upaya yang akan dilakukan adalah perlunya koordinasi dengan penyuluh untuk pendampingan dan pembinaan kelompok dan verifikasi awal pemenuhan syarat penerima bantuan.
- d. Capaian persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan tidak mencapai target disebabkan Saat ini tidak ada penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan sertifikat kesehatan (health certificate) dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan ke UPT BKIPM KKP berdasarkan UU 23 tahun 2014, terdapat peralatan pengujian rusak. Upaya yang akan dilakukan adalah Koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan akan diusulkan alokasi anggaran untuk perbaikan peralatan pengujian.